



LAPORAN KINERJA PANGKALAN PSDKP JAKARTA 2023



LAPORAN KINERJA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANA JAKARTA



Diterbitkan oleh :

Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2023

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta

PANGKALAN PSDKP JAKARTA

Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440

Telepon : (021) 6614712

Laman : djpsdkp.kkp.go.id

Email : psdkp.jakarta@kkp.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta kepada Unit Kerja Eselon I Ditjen PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan ini juga sebagai media informasi pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun anggaran 2023 kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Untuk mendukung reformasi birokrasi, Ditjen. PSDKP telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Jakarta telah menetapkan 5 Sasaran Strategis (SS), yaitu: (1) Pemantauan, Operasi Armada Dan Infrastruktur Pengawasan; (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (3) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; (4) Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan; (5) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen. PSDKP.

Capaian kinerja pada tahun 2023 sudah memenuhi target. 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Jakarta telah mencapai target sesuai rencana aksi. Hal ini karena sebagian besar kegiatan yang dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan.

Anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta pada Tahun 2023 sesuai SP DIPA-032.05.2.440816/2023 tanggal 30 November 2023, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 41.271.121.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) yang mengalami 17 (Tujuh Belas) kali revisi sampai pada revisi terakhir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.039.008.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah). Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2023 memperoleh nilai 107,81% "**Baik**". Realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp. 40.916.782.363,- "**99,70%**".

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu tahapan dalam siklus manajemen dalam sebuah organisasi, pelaporan mempunyai peran penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencapaian tujuan dari organisasi. Fungsi pelaporan semakin penting seiring adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut, dan dalam rangka perwujudan good governance diperlukan sistem pertanggungjawaban yang akuntabel, tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan rangkaian seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta serta membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan fungsi Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta pada masa yang akan datang untuk mewujudkan good governance.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan negara tentu saja laporan kegiatan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Jakarta, 12 Januari 2024

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Jakarta



Akhmadon, S.Pi,MM

NIP. 19740514 200212 1 005



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta (Pangkalan PSDKP Jakarta) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan misi kedaulatan. Peran tersebut secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam

pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pengelolaan kinerja di KKP diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pangkalan PSDKP Jakarta selama kurun waktu Januari – Desember 2023 dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta

Isu strategis Pengawasan SDKP terkait beberapa kebijakan, yakni :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) berbasis resiko;
- b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDP) berbasis resiko;
- c. *Destructive Fishing* berupa penggunaan bom, bius, dan penyetruman kerap terjadi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;

- d. Penangkapan dan distribusi ikan yang dilindungi (*Cites*) yang tidak memiliki dokumen perizinan;
- e. Kegiatan peredaran lobster, kepiting dan rajungan yang tidak sesuai ketentuan PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020;
- f. Pemanfaatan ruang laut yang harus dilengkapi oleh PKKPRL di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)

Dengan adanya isu aktual tersebut diharapkan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2023 dapat mempunyai peran untuk meningkatkan tertib pelaksanaan perundang-undangan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal wilayah kerja pengawasannya Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu

susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini:

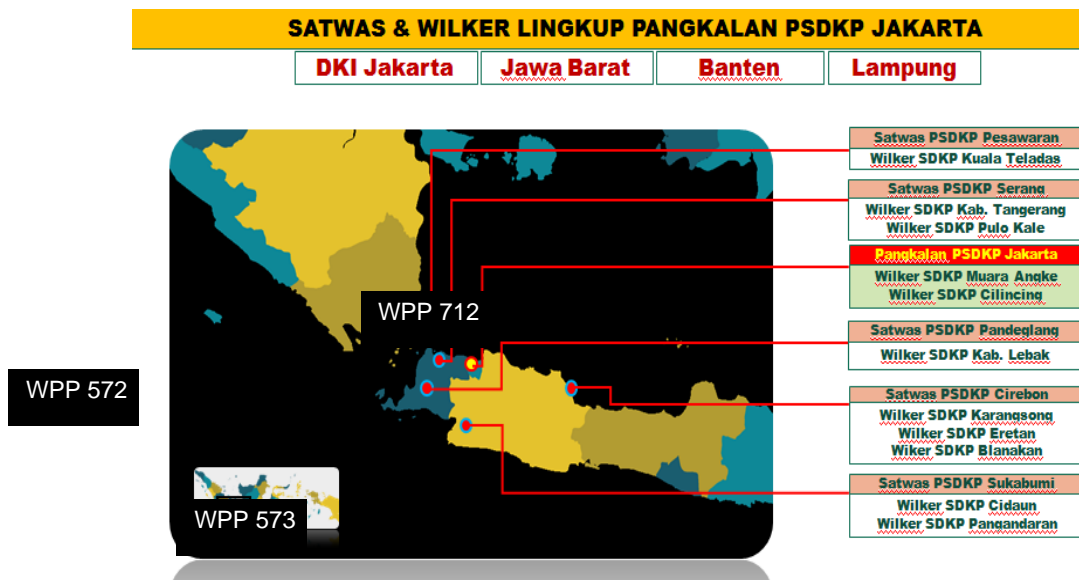


Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

1.5 Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati, selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa tersebar di satwas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari selatan Pulau Sumatera sampai Jakarta. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 meliputi Perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan WPP 573 Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa. Berikut peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat.
2	Satwas SDKP Pandeglang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
3	Satwas SDKP Pesawaran	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
4	Satwas SDKP Cirebon	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon
5	Satwas SDKP Sukabumi	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas SDKP Serang	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan, Pangkalan PSDKP Jakarta juga melaksanakan pengawasan di bidang kelautan, budidaya, pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

1.6 Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas

Dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Jakarta didukung 2 (dua) unit armada kapal pengawas, 6 (enam) unit *speedboat* pengawas dan 2 (dua) unit tipe RIB & *Rubber Boat*. Rincian armada kapal pengawas, *speedboat*, RIB & *rubber boat* dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Data Armada Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Tipe Kapal
1	Hiu 10	28 meter	Kelas IV
2	Hiu 06	28 meter	Kelas IV

Tabel 3. Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB & Rubber Boat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	Sea Rider	Pangkalan PSDKP Jakarta	8 meter
2	Rubber Boat	Satwas SDKP Pandeglang	5 meter

Tabel 4. Data Armada Kapal Pengawas tipe Speedboat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	Napoleon 006	Pangkalan PSDKP Jakarta	12 meter
2	Dolphin 004	Satwas SDKP Serang	8 meter
3	Napoleon 014	Satwas SDKP Pesawaran	12 meter
4	Dolphin 022	Satwas SDKP Cirebon	8 meter
5	Napoleon 052	Satwas SDKP Sukabumi	12 meter
6	Hiu Biru 03	Pangkalan PSDKP Jakarta	11 meter

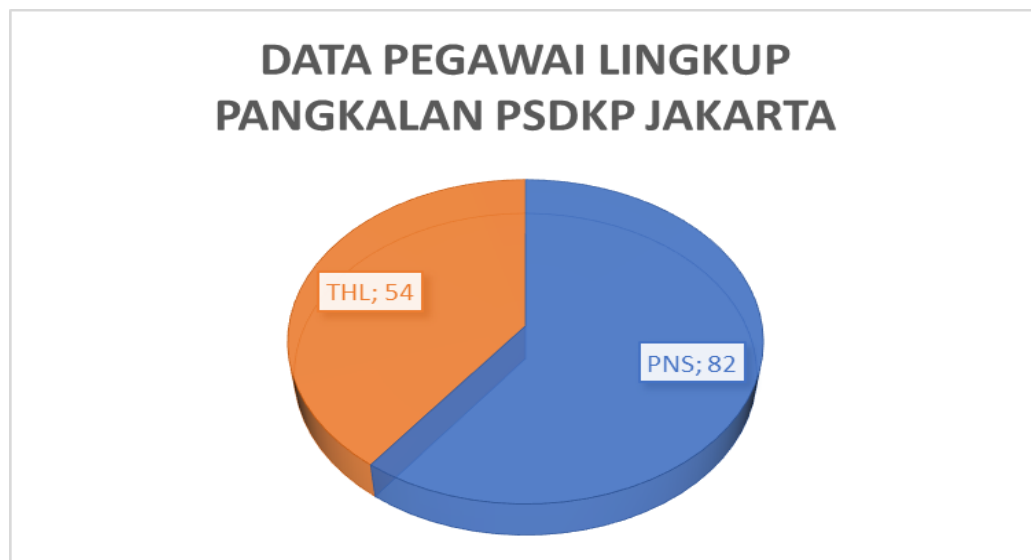
1.7 Kepegawaian

Sumber daya manusia Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2022 berjumlah 140 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 85 orang, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 55 orang. Data pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	UNIT KERJA	Jumlah		TOTAL
		PNS Ditjen PSDKP	PPNPN	
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	35	33	70
2	AKP Kapal Pengawas	18	-	18
3	Satwas SDKP Pesawaran	5	3	8
4	Satwas SDKP Pandeglang	3	2	5
5	Satwas SDKP Serang	4	3	7
6	Satwas SDKP Sukabumi	6	6	10
7	Satwas SDKP Cirebon	10	8	18
8	CPNS	4	-	4
Jumlah		85	55	140

Komposisi pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta, Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar 3.

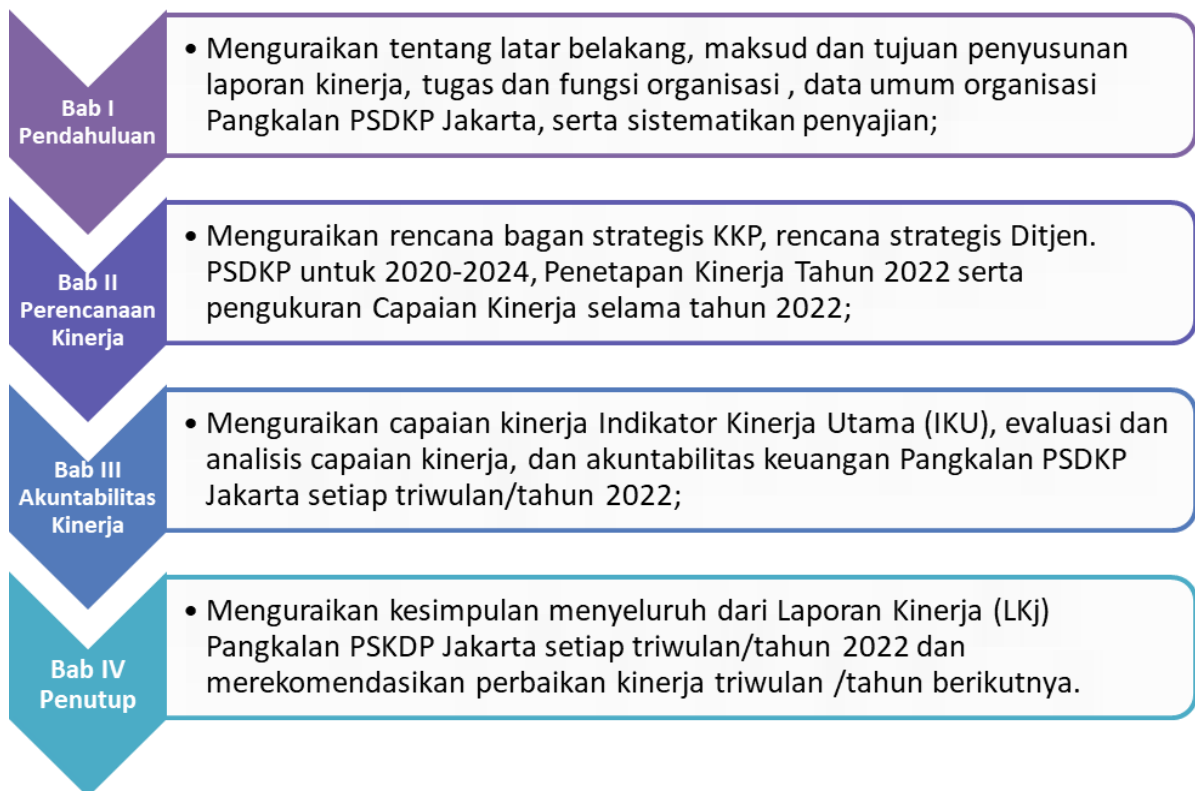


Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dari data pada diatas menggambarkan komposisi pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang sebagian besar berstatus PNS dan sebagian berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai daerah dalam melaksanakan fungsi dan menyelesaikan tugas Pengawasan SDKP, diperlukan kesepakatan/aturan antara Dirjen PSDKP dengan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai tersebut serta meningkatkan kompetensi, dapat menugaskan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan.

1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2022 diuraikan pada grafik berikut :



Grafik 2. Bagan sistem penyajian laporan kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024; ⁽²⁾ Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta 2020-2024; dan ⁽³⁾ Penetapan Kinerja Tahun 2022.

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas. Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (*Outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon IV) yang menghasilkan keluaran (*output*). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2 Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Rencana sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020-2024, merupakan penjabaran dari renstra Eselon I Ditjen PSDKP, dengan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP;
3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
4. Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Jakarta yang kompeten dan berkepribadian;
5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
6. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pangkalan PSDKP Jakarta yang berkepribadian;
7. Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta secara efisien.

Untuk mencapai program kerja Pengawasan SDKP maka Pangkalan PSDKP Jakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

- a. Melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari kerusakan dan kegiatan *illegal*;
- b. Mewujudkan ketaatan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Terwujudnya industrialisasi perikanan.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi

implementatif yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

2.3 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2023

Program Pengawasan Pengelolaan PSDKP

A. Pemantauan dan Operasi Armada

1. Kinerja Operasi Kapal Pengawas
2. Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas
3. Pemenuhan Logistik Armada Pengawas SDKP
4. POKMASWAS yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP
5. Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
6. Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal
4. Pengenaan Sanksi Administratif

C. Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
2. Pelaku Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan Yang Patuh Terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku

3. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
4. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
5. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing

D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan

E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)
3. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta
4. Indeks Profesionalitas ASN
5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja
6. Inovasi Gugus Kerja Transformasi
7. Kepatuhan Pengelolaan BMN
8. Kepatuhan Pengadaan/Barang Jasa
9. Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
11. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

2.4 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perjanjian kinerja telah ditetapkan pada bulan Januari 2022. Perjanjian kinerja mengalami perubahan pada tanggal 30 November 2023 dikarenakan terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) pada setiap satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perubahan perjanjian kinerja yang telah dilakukan revisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Perubahan Perjanjian Kinerja Semula Menjadi

No.	Perubahan	Semula	Menjadi	Keterangan
1	ISK.1.2.3	-	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	IKU Baru
2	ISK.1.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	Perubahan judul indikator
3	ISK.2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	Perubahan judul indikator
4	ISK.2.2.1	-	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	IKU Baru
5	ISK.3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (%)	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber	Perubahan judul indikator

			daya perikanan (Nilai)	
6	ISK.3.2.1	-	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	IKU Baru
7	ISK4.1.1	Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Perubahan judul indikator dan satuan target pada IKU dari (%) menjadi indeks
8	ISK4.1.2	-	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	IKU Baru
9	ISK4.1.3	-	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Peneanaan Sanksi Administratif (Indeks)	IKU Baru
10	ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	Perubahan judul indikator
11	ISK5.1.6	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	Perubahan judul indikator
12	ISK5.1.13	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	Perubahan judul indikator dan nilai target dari 89 menjadi 93,75

Perjanjian kinerja yang telah direvisi 30 November 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6
		ISK.1.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	80
SK.2.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	ISK.2.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100%
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	ISK3.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK.3.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	ISK.3.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100%
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		ISK4.1.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		ISK4.1.3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75
		ISK5.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100%
		ISK5.1.5	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	78
		ISK5.1.6	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	80,5
		ISK5.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75%
		ISK5.1.8	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	21
		ISK5.1.9	Inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	92%
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	77,5%
		ISK5.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	77,5%
		ISK5.1.13	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	93,75
		ISK5.1.14	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	86

2.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh SS yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta dengan Direktur Jenderal PSDKP.

3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2023 ditabulasikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2023

Perspektif/sasaran startegis/Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 (%)
SK1.1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif				
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	100	120
SK.1.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif				
IKU 2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	100	120
IKU 3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6	98,05	112
IKU 4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100
K.1.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
IKU 5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100

SK.2.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan				
IKU 6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	80	100	120
SK.2.2 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan				
IKU 7	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100	100	100
SK.3.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan				
IKU 8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100
SK.3.2 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan				
IKU 9	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100	100	100
SK.4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas				
IKU 10	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	100	120
IKU 11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	74,10	92,63
IKU 12	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80	100	120
SK.5.1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP				
IKU 13	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80	87,19	109
IKU 14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80	88,61	110,8
IKU 15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75	85,95	114,6
IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100
IKU 17	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	78	83,17	106,6
IKU 18	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	80,50	79,25	98,45

IKU 19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	120
IKU 20	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	21	23,83	113,5
IKU 21	Inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	2	120
IKU 22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	92	93,33	120
IKU 23	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	77,5	100	120
IKU 24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	77,5	93,39	120
IKU 25	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	93,75	90,71	96,76
IKU 26	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	82	84,82	103,4

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan tahun 2023 Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Sasaran Kegiatan 1, Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Dalam rangka pencapaian SK "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif", Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 1 "Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)"

Kelompok Masyarakat Pengawas atau disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP. Pokmaswas merupakan mitra pengawas perikanan melalui laporan atau informasi adanya IUU Fishing di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. IKU "Persentase POKMASWAS yang aktif yang mendukung pengawasan SDKP (%)" ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP.

Tabel 9. Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%) Periode 2020-2023

SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	-	-	-	95	100	120	100	100	100	80	100	120	100

Pada tahun 2023, kegiatan terkait "Persentase POKMAWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP" sudah dilaksanakan Pangkalan PSDKP Jakarta dengan melaksanakan pembinaan terhadap POKMASWAS. Target IKU ini pada tahun 2023 adalah 80%, sehingga dapat disimpulkan capaian IKU kegiatan ini lebih dari 120%. Capaian IKU ini telah berhasil melebihi target yang ditentukan dikarenakan kegiatan dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun dan penyelesaian laporan dilakukan tepat setelah kegiatan dilaksanakan.

Pada tahun 2022, capaian kegiatan pembinaan POKMASWAS sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Nilai tersebut menunjukkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerjanya dari tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2023 lebih

tinggi karena nilai target lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 80%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 100%.

Pembinaan telah dilaksanakan terhadap 57 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang tersebar dari wilayah sekitar provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat. Hasil pembinaan telah di laporkan kepada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS/form keaktifan POKMASWAS serta dilaksanakan pendataan keaktifan POKMASWAS. Pembinaan dilakukan berdasarkan rencana kegiatan POKMASWAS yang telah disusun dalam laporan rencana kegiatan pembinaan tahun anggaran 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta. Berikut rekapitulasi kegiatan pembinaan POKMASWAS selama tahun 2023:

Tabel 10. Rekapitulasi Kegiatan Pembinaan POKMASWAS tahun 2023

No	Nama Pokmaswas	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	No	Nama Pokmaswas	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
1	Dewa Mas	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	30	Mitra Mandiri	Aula Sinar Laut Kec Argabinta Kab. Cianjur
2	Panaragan Indah	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	31	Berkah Jaya Mandiri	Aula Sinar Laut Kec Argabinta Kab. Cianjur
3	Sumber Rejeki	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	32	Sumber Laut	Aula Rawa Meneng Kec. Blanakan Kab. Subang
4	Gunung Katun Jaya	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	33	Bintang Timur	Aula Rawa Meneng Kec. Blanakan Kab. Subang
5	Karta Jaya	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	34	Kuda Laut	Aula Rawa Meneng Kec. Blanakan Kab. Subang
6	Mekar Dewa	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	35	Bahari Jaya	Aula Rawa Meneng Kec. Blanakan Kab. Subang
7	Gunung Katun Malay Jaya	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	36	Mina Sempati	Gedung PGRI Kec. Caringin Kab. Garut
8	Watbakat	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	37	Cipunaga	Gedung PGRI Kec. Caringin Kab. Garut
9	Putra Dewa	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	38	Setu Babakan	Gedung PGRI Kec. Caringin Kab. Garut
10	Damai Sejahtera	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	39	Situ Burung	Gedung PGRI Kec. Caringin Kab. Garut
11	Jelabat	Gedung Serbaguna Kulon Rowo, Kab. Tulang Bawang Barat, 04 Mei 2023	40	Samudera Jaya	Gedung Serbaguna Hotel Wiwi Perkasa 2, JL. D.I Panjaitan No. 44
12	Matahari Ir. H. Juanda	Gedung Serbaguna Tajug Gede Kab. Purwakarta, Jum'at 12 Mei 2023	41	Mitra Bojong Sari	Gedung Serbaguna Hotel Wiwi Perkasa 2, JL. D.I Panjaitan No. 44
13	Himpunan Nelayan Jati Luhur (HINPUJAT)	Gedung Serbaguna Tajug Gede Kab. Purwakarta, Jum'at 12 Mei 2023	42	Mina Bolang Lestari	Gedung Serbaguna Hotel Wiwi Perkasa 2, JL. D.I Panjaitan No. 44
14	Hurip Suksari Suksari Jaya	Gedung Serbaguna Tajug Gede Kab. Purwakarta, Jum'at 12 Mei 2023	43	Mina Berkah Bahari	Gedung Serbaguna Hotel Wiwi Perkasa 2, JL. D.I Panjaitan No. 44
15	Curug Sindang Sukatani	Gedung Serbaguna Tajug Gede Kab. Purwakarta, Jum'at 12 Mei 2023	44	Raksa Segara	Gedung Serbaguna Hotel Wiwi Perkasa 2, JL. D.I Panjaitan No. 44
16	Pagar Laut	Yayasan Nurul Huda. Kab. Pangandaran. Rabu, 24 Mei	45	Pantai Lestari	Gedung Serbaguna Hotel Wiwi Perkasa 2, JL. D.I Panjaitan No. 44
17	Kontamina	Yayasan Nurul Huda. Kab. Pangandaran. Rabu, 24 Mei	46	Embung Mahesa Sidadadi	Gedung Serbaguna Hotel Wiwi Perkasa 2, JL. D.I Panjaitan No. 44

No	Nama Pokmaswas	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	No	Nama Pokmaswas	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
18	Bintang Laut	Yayasan Nurul Huda. Kab. Pangandaran. Rabu, 24 Mei	47	Embung Baruna Wanakarya	Gedung Serbaguna Hotel Wiwi Perkasa 2, JL. D.I Panjaitan No. 44
19	Camar Laut	Yayasan Nurul Huda. Kab. Pangandaran. Rabu, 24 Mei	48	Cikal Bakal Maju Sejahtera	Gedung Serbaguna Hotel Wiwi Perkasa 2, JL. D.I Panjaitan No. 44
20	Raksa Samudera	Yayasan Nurul Huda. Kab. Pangandaran. Rabu, 24 Mei	49	Muara Bina Bahari	Desa Kedung Ringin, Kec. Pasir Sakti
21	Cibitung	Gedung Serbaguna Pondok Hexa, Ujung Genteng, Minggu 11 Juni 2023	50	Jaya Bahari	Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai, Desa Margasari, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung
22	Genteng Nusantara	Gedung Serbaguna Pondok Hexa, Ujung Genteng, Minggu 11 Juni 2023	51	Duta Laksana Bahari	Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai, Desa Margasari, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung
23	Mandrajaya Nusantara	Gedung Serbaguna Pondok Hexa, Ujung Genteng, Minggu 11 Juni 2023	52	Banyu Biru	Desa Sawah Luhur, Kec. Kasemen, Kab. Serang, Prov. Banten
24	Tegalbuleud Nusantara	Gedung Serbaguna Pondok Hexa, Ujung Genteng, Minggu 11 Juni 2023	53	Cipasilian	Desa Sawah Luhur, Kec. Kasemen, Kab. Serang, Prov. Banten
25	Mina Sari	Aula Sinar Laut Kec Argabinta Kab. Cianjur	54	Rimau Abadi	Desa Ruguk, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung
26	Jaya Makmur	Aula Sinar Laut Kec Argabinta Kab. Cianjur	55	Beringin Mulya	Desa Ruguk, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung
27	Jayanti	Aula Sinar Laut Kec Argabinta Kab. Cianjur	56	Putra Bahtera	Desa Ruguk, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung
28	Jaga Baya	Aula Sinar Laut Kec Argabinta Kab. Cianjur	57	Langgeng	Desa Ruguk, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung
29	Baruna jaya	Aula Sinar Laut Kec Argabinta Kab. Cianjur			

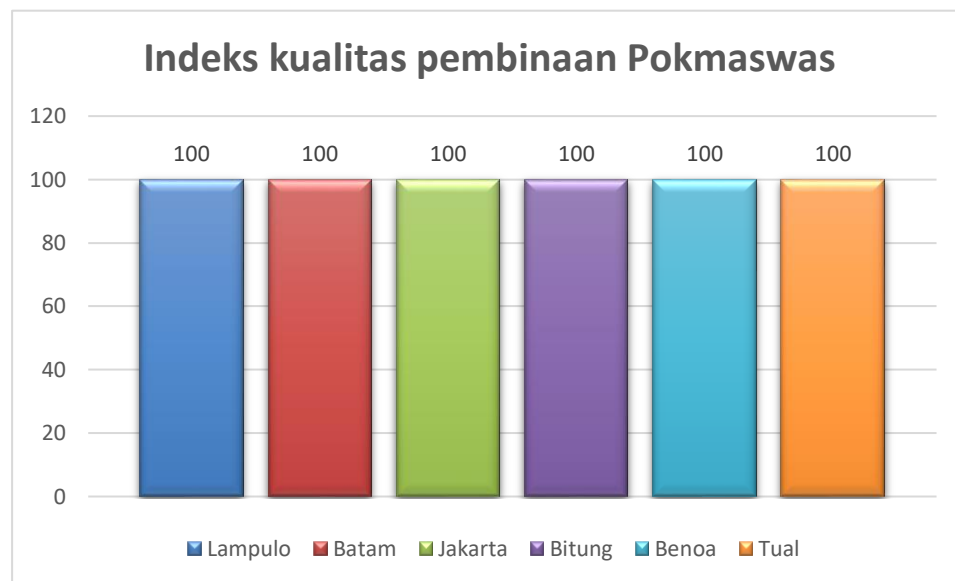
Berdasarkan data diatas dapat diketahui kegiatan pembinaan dilaksanakan pada sekitar wilayah Provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat sebanyak 57 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Kegiatan ini juga melibatkan narasumber antara lain Komisi IV DPR RI, Ditjen PSDKP, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Direktur PPSDP, Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, Bupati daerah setempat, dan Camat daerah setempat.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan pembinaan POKMASWAS belum ada, sehingga diperlukan adanya reviu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan IKU sebelumnya sudah tidak relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran untuk IKU "Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%) sebesar Rp. 1.399.800.000,-. Realisasi anggaran untuk kegiatan

sebesar Rp. 1.399.668.350,- sehingga telah tercapai 99,99%. Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 120% dan realisasi anggaran sebesar 99,99% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Persentase POKMAWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP” pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase POKMAWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP” dengan unit kerja lain :



Grafik 3. Perbandingan IKU 1 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan UPT yang lain. Terpenuhinya capaian IKU ini dikarenakan banyaknya POKMASWAS yang aktif di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 57 kelompok dari target 13 kelompok.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya koordinasi yang intensif dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk melaksanakan rencana sosialisasi dan pembinaan POKMASWAS yang melibatkan seluruh instansi lingkup Ditjen PSDKP.

3.3.2 Sasaran Kegiatan 2, Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

IKU 2 “Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)”

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal;
8. Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR;
9. Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, destructive fishing dan pelanggaran kelautan lainnya.

Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Kapal Pengawas

SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
Indeks Kinerja Kapal Pengawas (Indeks)	-	-	-	-	-	-	85	98,33	116	87,6	100	114	100

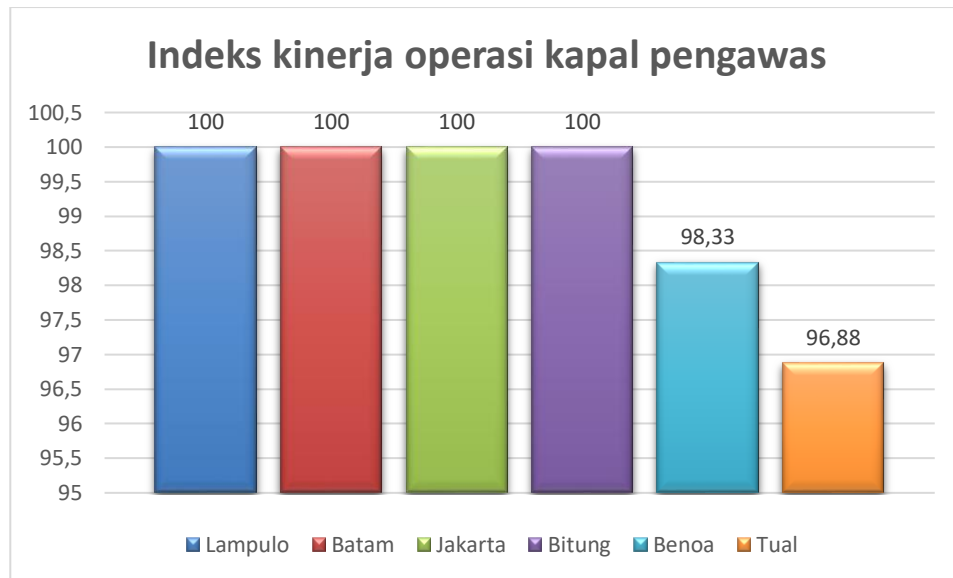
Indeks kinerja operasi kapal pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2023 adalah 100 dengan target yang telah ditentukan sebesar 87,6, sehingga nilai capaian IKU ini sebesar 114,2%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target pada tahun 2023, dikarenakan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan

rencana operasi yang telah direncanakan. Kesesuaian tersebut tidak lepas dari peran serta tim perencanaan yang selalu berkoordinasi dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk mengetahui perhitungan yang sesuai dengan manual iku. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. Meningkatnya IKU ini dari 98,33 menjadi 100 dikarenakan pada tahun 2023 kegiatan operasi kapal pengawas berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terdapat kerusakan pada kapal pengawas seperti tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan indeks operasi kapal pengawas belum ada, sehingga diperlukan adanya revaluasi Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU yang ditetapkan adalah Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%). IKU tersebut merupakan persentase hasil perbandingan frekuensi operasi kapal pengawas, periode operasi kapal pengawas, jangkauan pemantauan melalui radar Kapal Pengawas (nm), kecepatan dinas (nm/jam), lama waktu pengawasan (jam), faktor koreksi aktual WPPNRI, faktor koreksi aktual kapal pengawas dengan Luas area WPPNRI. Revaluasi Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan IKU sebelumnya sudah tidak relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp 10.992.988.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.988.916.398,- (99,96%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 114% dan realisasi anggaran sebesar 99,96% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” dengan unit kerja lain :



Grafik 4. Perbandingan IKU 2 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan dari 3 (tiga) UPT yang lain akan tetapi lebih tinggi dari UPT Pangkalan PSDKP Benoa dan Tual. Hal ini dikarenakan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan rencana operasi kapal pengawas.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya rapat monitoring dan evaluasi tahun 2023 yang terkait penyusunan rencana operasi kapal dan *speedboat* tahun 2023 yang diikuti seluruh Satker pusat dan UPT lingkup Ditjen PSKDP.

IKU 3 “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas”

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni :

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;

- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 12. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Speedboat

SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
Indeks Kinerja Kapal Pengawas (Indeks)	-	-	-	-	-	-	85	90,47	106	87,6	98,05	112	100

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2022 adalah 98,05 dengan target yang telah ditentukan sebesar 87,6, sehingga nilai capaian IKU ini sebesar 112%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target pada tahun 2023, dikarenakan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan rencana operasi yang telah direncanakan. Kesesuaian tersebut tidak lepas dari peran serta tim perencanaan yang selalu berkoordinasi dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk mengetahui perhitungan yang sesuai dengan manual iku. Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2023, pada tabel dibawah ini :

Tabel 13. Nilai indeks kinerja operasi speedboat tahun 2023

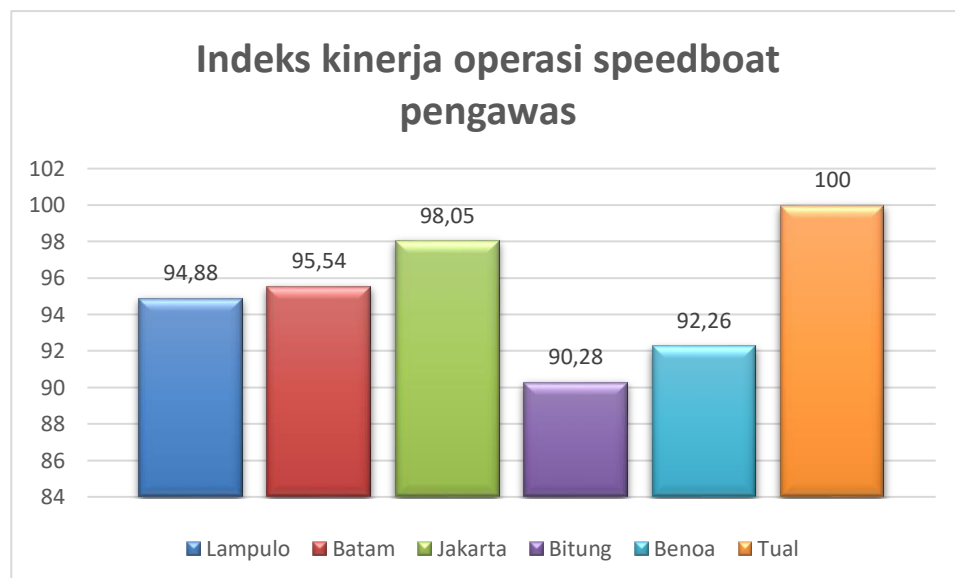
Speedboat Pengawas	Pemeriksaan kapal (50%)			Pemeriksaan Kelautan(50%)			Pemeriksaan kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan			Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Cakupan Wilayah Pengawasan			Intercept Indeksi Pelanggaran kelautan Perikanan (60%)			Dukungan kegiatan SAR (40 %)			Tindak Lanjut Target Operasi			Jumlah Penyitaan Alkap Tertangkap (40%)			Dukungan Ops Bersama (20%)			Jumlah Pemutusan Rumpon Illegal (40%)			Dukungan Kegiatan Operasi Lainnya			Total Nilai Indeks	Capaian Indeks
	TW IV						TW IV						TW IV						TW IV																			
	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai					
Dolphin 04	60	62	50,00	0	1	50,00	40,00	0,0249	0,0288	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	0	0	40,00	5,00	100							
Napoleon06	60	93	50,00	0	3	50,00	40,00	0,0249	0,0253	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	0	0	40,00	5,00	100							
Napoleon 14	60	67	50,00	0	2	50,00	40,00	0,0249	0,0278	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	0	0	40,00	5,00	100							
Napoleon52	60	64	50,00	0	3	50,00	40,00	0,0249	0,0386	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	0	0	40,00	5,00	100							
Sea Rider/RIB	60	60	50,00	0	0	50,00	40,00	0,0249	0,0282	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	0	0	40,00	5,00	100							
Rubber Boat	60	57	47,50	0	1	50,00	39,00	0,0249	0,0265	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	0	0	40,00	5,00	99							
Hlu Biru	60	22	18,33	0	0	50,00	27,33	0,0249	0,0655	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	0	0	40,00	5,00	87							

Berdasarkan tabel diatas, realisasi nilai indeks kinerja operasi speedboat Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 98,05. Nilai tersebut diperoleh dari beberapa indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah dicapai sampai dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. Meningkatnya IKU ini dari 90,47 menjadi 98,05 dikarenakan pada tahun 2023 kegiatan operasi speedboat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terdapat kerusakan mesin pada salah satu speedboat seperti tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan indeks operasi *speedboat* belum ada, sehingga diperlukan adanya reviu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU yang ditetapkan adalah Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau *speedboat* lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%). IKU tersebut merupakan nilai dari perbandingan frekuensi operasi *Speedboat* Pengawas, periode operasi *Speedboat* Pengawas, jangkauan pemantauan melalui radar, kecepatan dinas, lama waktu pengawasan, faktor koreksi aktual *Speedboat* dengan Luas area WPPNRI. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan IKU sebelumnya sudah tidak relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung IKU Indeks Kinerja *Speedboat* Pengawas sebesar Rp 1.243.180.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.240.573.327,- (99,79%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 112% dan realisasi anggaran sebesar 99,79% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas” dengan unit kerja lain :



Grafik 5. Perbandingan IKU 3 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih tinggi dibandingkan 5 (lima) UPT lainnya. Hal ini dikarenakan operasi *speedboat* sesuai dengan rencana operasi *speedboat*.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya rapat monitoring dan evaluasi tahun 2023 yang terkait penyusunan rencana operasi kapal dan *speedboat* tahun 2023 yang diikuti seluruh Satker pusat dan UPT lingkup Ditjen PSKDP.

IKU 4 “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)”

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan logistik kapal dan pemenuhan logistik personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas. Logistik Personel terdiri dari bahan makanan, air tawar, dan alat-alat pelayanan (ATK, bahan komputer, komaliwan, peta dan atau buku jurnal deck & mesin).

Kegiatan pemenuhan logistik armada kapal pengawas telah terlaksana dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan BBM setiap bulan yang berasal dari berita acara BBM akhir bulan;
2. Pemenuhan kebutuhan pelumas setiap triwulan yang berasal dari Surat Permintaan Kebutuhan BBM dari Kapal Ke Kantor dan SPJ Pembelian/BAST;
3. Pemenuhan kebutuhan bahan makan setiap bulan yang berasal Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian;
4. Pemenuhan kebutuhan air tawar setiap bulan yang berasal dari Surat Pengantar Kebutuhan Air Tawar dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian;
5. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan setiap triwulan yang berasal dari Surat Pengantar Kebutuhan ATK, CS, Jurnal Deck/Mesin, Peta Laut, Buku Pasang Surut dan alat alat layanan lainnya.

Berikut rekapitulasi persentase pemenuhan logistik kapal pengawas berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini :

Tabel 14. Capaian Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	90	90	100	100	100	100	-

Indikator logistik diatas telah terpenuhi selama tahun 2023 sehingga realisasi yang dicapai Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 100% yaitu sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 100%. Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas” diperoleh sebesar 100%. Kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditentukan merupakan suatu keberhasilan yang dicapai. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya pegawai yang kompeten dalam pelaksanaan kebutuhan logistik armada pengawasan SDKP dan adanya komunikasi yang baik antara awak kapal pengawas dengan Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Jakarta.

Pada tahun 2023, IKU “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas” memiliki target dengan satuan persen, sedangkan pada tahun 2022 terdapat perbedaan perhitungan dan satuan nilai pada target yaitu indeks. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 2023, sehingga IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun secara perhitungan terdapat beberapa kegiatan yang sama dengan tahun ini.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP belum ada, sehingga diperlukan adanya reviu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU ini belum ada karena kegiatan baru dimunculkan pada tahun 2022 dan termasuk IKU baru. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan perlu adanya penambahan IKU pad Renstra 2020-2024 agar relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung IKU Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP sebesar Rp 10.992.988.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.988.916.398,- (99,96%) Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,96% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP” dengan unit kerja lain :



Grafik 6. Perbandingan IKU 4 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan UPT setingkat lainnya. Hal ini dikarenakan Pangkalan PSDKP Jakarta menggunakan metode perhitungan yang diberikan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Perhitungan yang digunakan memiliki bobot maksimal 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya koordinasi yang baik dengan Direktorat Pemantaun dan Operasi Armada sehingga IKU ini berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

3.3.3 Sasaran Kegiatan 3, Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan IKU, sebagai berikut :

IKU 5 “Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) adalah jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 8 (delapan) unit *Speedboat*.

Pada tahun 2023, kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP telah terlaksana dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas yang dilaksanakan setiap bulan yang dibuktikan dengan Laporan perawatan rutin bulanan;
2. Perawatan Prediktif Kapal Pengawas yang dilaksanakan setiap tahun yang dibuktikan dengan pelaksanaan *service Liferaft* di bulan Maret 2023 untuk kapal Hiu 10 dan pada bulan September 2023 dilakukan *service* alat pemadam pada kapal Hiu 06;
3. Perawatan Darurat Kapal Pengawas yang dilaksanakan setiap bulan dari bulan Februari 2023 yang dibuktikan dengan Laporan Perbaikan;
4. Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat yang dilaksanakan setiap bulan yang dibuktikan dengan Laporan perawatan rutin bulanan;
5. Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat yang dilaksanakan;
6. Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat yang dilaksanakan setiap bulan yang dibuktikan dengan Laporan Perbaikan.

Penyelesaian perawatan telah terlaksana selama tahun 2023 sehingga realisasi yang dicapai Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 100% yaitu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Capaian IKU “Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” diperoleh sebesar 100%. Kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditentukan merupakan suatu keberhasilan yang dicapai. Berikut Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode 2021-2023:

Tabel 15. Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan periode 2021-2023

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Realisasi kegiatan pada IKU diatas sebesar 100% dengan capaian 100%. Tabel diatas menunjukkan konsistensi nilai pada kegiatan perawatan tahun 2021-2023. Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya pada kegiatan ini. Terlaksananya kegiatan perawatan yang sesuai akan berpengaruh pada performa sarana pengawasan dalam mencapai kegiatan operasi kapal pengawas dan *speedboat*. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya pegawai yang kompeten dalam pelaksanaan perawatan sarana pengawasan dan adanya komunikasi yang baik antara awak kapal pengawas dan *speedboat* dengan Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Jakarta.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dengan konsistensi nilai 100% maka kemungkinan besar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2021-2023 sehingga kegiatan perawatan sarana pengawasan dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 4.256.266.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.255.748.800,- (99,99%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,99% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 7. Perbandingan IKU 5 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan UPT lainnya. Hal ini dikarenakan setiap UPT melaksanakan kegiatan armada yang dirawat sesuai dengan target yang diberikan yaitu sebesar 100%.

3.3.4 Sasaran Kegiatan 4, Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan” yaitu upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Berikut kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan tersebut:

IKU 6 " Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)"

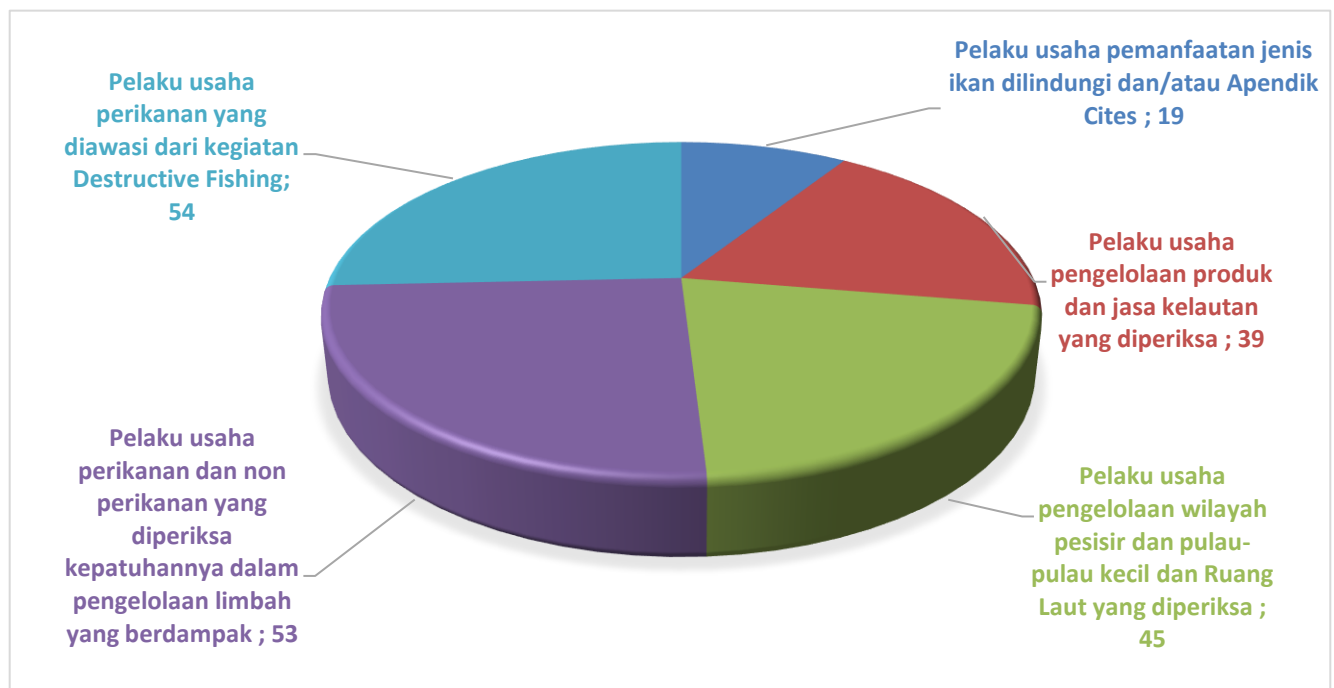
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai) pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 120%. Hasil pengukuran 5 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 16. IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)

SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	-	-	-	95*	100*	120	100*	100*	100	80	100	120	100

*) Satuan nilai persentase

Dari data diatas, realisasi IKU pada tahun 2023 mencapai 100 dengan target sebesar 80 sehingga memperoleh capaian sebesar 120%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan sebanyak 210 pelaku usaha yang berada di lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas sudah memenuhi tahapan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Berikut grafik kinerja pengawasan kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan:



Grafik 8. Rekapitulasi kegiatan kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

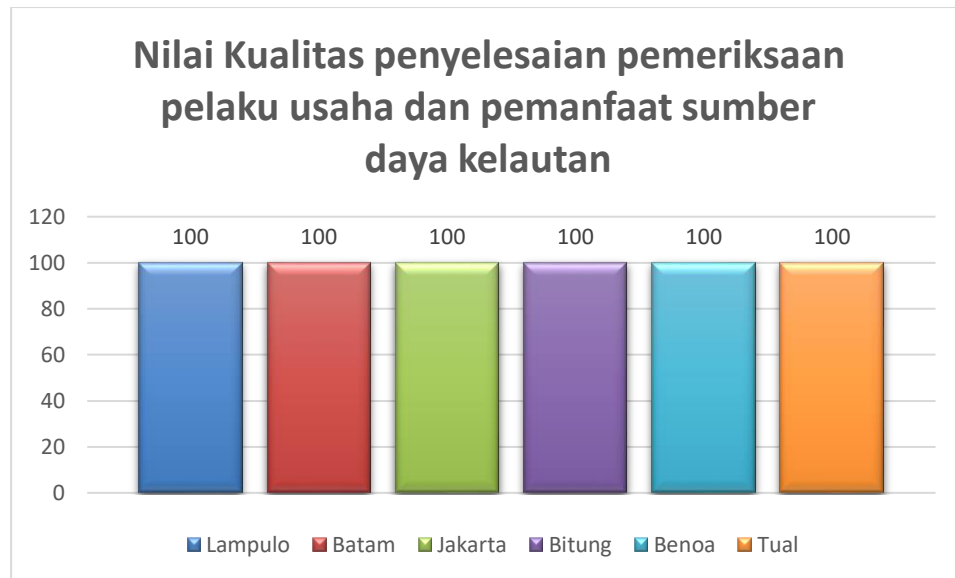
Pada grafik diatas terlihat nilai tertinggi yang dilakukan pada pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah kegiatan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *Destructive Fishing* dengan total jumlah 54 pelaku usaha. Nilai terendah adalah kegiatan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *appendik cites* dengan jumlah 19 pelaku usaha. Total jumlah pelaku usaha sampai dengan september 2023 adalah 210 pelaku usaha.

Perbandingan dengan tahun 2022, capaian untuk kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah 120% dengan jumlah pelaku usaha yang telah diawasi sebanyak 79 pelaku usaha. Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya selama tahun 2023 dengan meningkatkan jumlah pelaku pengawasan dari 79 menjadi 210 pelaku usaha. Meningkatnya pengawasan pelaku usaha kelautan dikarenakan telah dilakukan perencanaan dengan baik oleh tim kerja SDK yaitu mengelompokkan pengawasan berdasarkan lokasi.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun ini maka kemungkinan besar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2021-2023 sehingga kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran untuk IKU “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)” sebesar Rp 902.988.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 902.980.584,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU 1 (100%) dan realisasi anggaran (100%) dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan tidak membayarkan transport lokal untuk lokasi objek pengawasan yang berada dalam kawasan unit kerja.

Capaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha kelautan” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha kelautan” dengan unit kerja lain :



Grafik 9. Perbandingan IKU 6 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan seluruh UPT Pangkalan dimana seluruh UPT memiliki capaian IKU ini sebesar 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis dan diklat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Berikut rekapitulasi kegiatan bimbingan teknis dan diklat yang dilaksanakan periode tahun 2023 :

Tabel 17. Rekapitulasi kegiatan bimtek dan diklat terkait pengawasan sumber daya kelautan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Diklat Teknis Valuasi Kerusakan Terumbu Karang	14 - 18 Februari 2023	Pulau Pramuka, Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
2	Diklat Geographic Information System (GIS)	21 - 24 Februari 2023	Hotel Pangrango, jl. Raya Pajajaran no.1 rt.03 rw.06, Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor

IKU 7 "Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)"

Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta bersama Loka PSPL Serang dan Satwas SDKP Pandeglang melakukan inspeksi lapang dan sosialisasi terkait pengaduan masyarakat terhadap 12 pelaku usaha budidaya yang terindikasi belum memiliki dokumen PKKPR. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan terhadap 12 Pelaku usaha budidaya yang terindikasi melakukan pemanfaatan ruang laut, terdapat 11 pelaku usaha telah melakukan pengajuan PKKPR melalui aplikasi OSS dan 1 (satu) pelaku usaha tidak membutuhkan PKKPR. Terdapat 1 (satu) pelaku usaha tidak membutuhkan PKKPR dikarenakan tidak ada Pemanfaatan air laut/ruang laut dan kegiatan usaha sudah berubah menjadi budidaya ikan air tawar dan pipa air laut sudah dilakukan pembongkaran an. Koperasi Mina Muara Sejahtera. Pangkalan PSDKP Jakarta juga melakukan sosialisasi terkait kewajiban memiliki PKKPR bagi pekaku usaha yang memanfataakan ruang laut, serta syarat dan tahapan pengajuan PKKPR. Kegiatan pengawasan tersebut telah selesai dikumpulkan dan menjadi realisasi yang mendukung IKU ini, sehingga dapat disimpulkan capaian sebesar 100%. Capaian diperoleh dari jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang selesai dikumpulkan dibagi jumlah yang ditargetkan. Target yang ditentukan adalah 1 data dan informasi, sehingga didapatkan capaian sebesar 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target meskipun IKU ini adalah IKU baru. IKU ini sangat berkaitan erat dengan IKU “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)” karena kegiatan pengawasan pulbaket termasuk ke dalam rencana pengawasan tahun 2023.

Berikut rekapitulasi capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)” periode 2020-2023:

Tabel 18. Rekapitulasi Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan Periode 2020-2023

SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Kegiatan ini termasuk IKU baru, sehingga persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IKU ini juga belum masuk kedalam renstra periode 2020-2024, sehingga perlu adanya

telaah/reviu renstra pada tahun 2024 sehingga sejalan dengan Perjanjian Kinerja (PK) terbaru.

Alokasi anggaran untuk IKU “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)” sebesar Rp 902.988.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 902.980.584,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU 7 (100%) dan realisasi anggaran (100%) dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan tidak membayarkan transport lokal untuk lokasi objek pengawasan yang berada dalam kawasan unit kerja.

Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)” pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan” dengan unit kerja lain :



Grafik 10. Perbandingan IKU 7 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan seluruh UPT Pangkalan dimana seluruh UPT memiliki capaian IKU ini sebesar 100%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya koordinasi yang baik dengan Loka PSPL Seranga sehingga kegiatan pengawasan menjadi optimal.

3.3.6 Sasaran Kegiatan 6, Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

IKU 8 "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (Nilai)"

Penentuan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Perhitungan IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan"

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

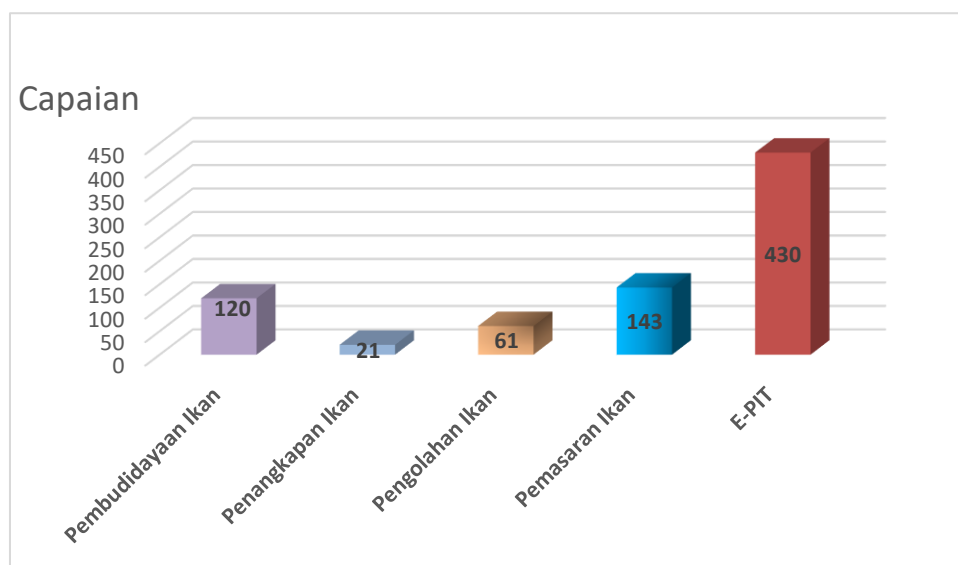
. Perhitungan realisasi berdasarkan tahapan pemeriksaan yaitu persiapan, pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha dan penyusunan laporan hasil pengawasan yang ditembuskan kepada Direktur PPSDP. Pengawasan yang telah diperiksa dan sesuai dengan tahapan pemeriksaan akan memperoleh nilai 100. Target IKU ini sebesar 100, maka capaian yang didapatkan adalah 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan didukung adanya personal pengawas perikanan yang kompeten dan mendokumentasikan kegiatan pengawas langsung dihari yang sama pada grup *Whatsapp* Pangkalan PSKDP Jakarta. Berikut rekapitulasi IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (Nilai)" periode 2020-2023:

Tabel 20. Rekapitulasi IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Periode tahun 2020-2023"

SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa IKU ini adalah IKU baru, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IKU ini juga belum ada pada renstra 2020-2024, maka diperlukan adanya telaah/reviu renstra di tahun 2024.

Pada tahun 2023, pengawasan yang telah sesuai dengan tahapan pemeriksaan sebanyak 775. Pengawasan tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan berdasarkan kode proyek yaitu pelaku usaha pembudidaya ikan, penangkapan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan dan penangkapan ikan terukur. Berikut rekapitulasi jumlah kegiatan pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaatan sumber daya perikanan di Pangkalan PSDKP Jakarta :



Grafik 11. Rekapitulasi Kegiatan yang Mendukung Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

Pada tahun 2023, IKU ini sudah terealisasi sebanyak 775 kode proyek dari 5 kegiatan pengawasan. Seluruh kode proyek yang diperiksa telah memenuhi tahapan pemeriksaan sehingga capaian pada tahun ini 100% dengan target sebesar 100% sehingga realisasi sesuai dengan target. Lokasi pengawasan dilaksanakan di sekitar wilayah Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

IKU “Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” merupakan perubahan dari “IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta”. Perubahan tersebut menjadikan IKU ini tidak bisa dibandingkan, dikarenakan adanya perbedaan satuan capaian. Pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 424 KBLI sedangkan tahun tercapai 775 kode proyek sehingga IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 target IKU ini belum ada meskipun secara output kegiatan IKU ini sama dengan kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan. Apabila dibandingkan dengan outputnya, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerjanya sampai dengan periode selanjutnya.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp 1.500.000.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.499.942.720,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien karena kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan adanya penggabungan kegiatan pengawasan UPI dengan pengawasan distribusi pada periode ini.

Capaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan” dengan unit kerja lain :



Grafik 12. Perbandingan IKU 8 dengan unit kerja lain

Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan seluruh UPT, dimana seluruh UPT telah memenuhi nilai kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan sebesar 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis dan diklat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya

kelautan. Berikut rekapitulasi kegiatan bimbingan teknis dan diklat yang dilaksanakan periode tahun 2023 :

Tabel 21. Rekapitulasi kegiatan bimtek dan diklat terkait pengawasan sumber daya perikanan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Bimbingan Teknis Pengawasan Standar Usaha Subsektor Pembudidayaan Ikan	15 - 19 Februari 2023	Hotel Aryaduta Makasar, Jl. Somba Opu no.297 Makasar, Prov. Sulawesi Selatan
2	Bimbingan Teknis Pengawasan Distribusi Benih Bening Lobster	9-12 Maret 2023	Hotel Ibis Style Bogor, Jl. Raya Pajajaran no. 37 rt.03 rw.08 Babakan, Kec. Bogor tengah, Kota Bogor

3.3.7 Sasaran Kegiatan 7, Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan

IKU 9 “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)”

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha adalah perbandingan nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Pada tahun 2023, Pangkalan PSKDP Jakarta telah melaksanakan kegiatan Pulbaket. Kegiatan Pulbaket dilaksanakan pada tanggal 4-6 April 2023 di Kab. Pandeglang, Provinsi Banten. Pengawasan dilaksanakan pada PT. Kona Bay Indonesia yang memiliki kegiatan pembesaran crustacea laut dengan kode KBLI 031216. Hasil pengawasan tersebut diketahui bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai kepatuhan sebesar 80%. Perusahaan tersebut akan memindahkan lokasi kegiatan ke daerah Karangasem, Bali dan masih perlu melengkapi dokumen LKU. Untuk itu pengawas perikanan memberikan rekomendasi hasil pengawasan yaitu berupa perbaikan. Pengawasan pada PT. Kona Bay Indonesia telah

didokumentasikan dan memenuhi tahapan pemeriksaan sehingga realisasi untuk IKU ini adalah 1 data dan informasi intelijen dengan capaian 100%. Capaian ini didapatkan dari jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang selesai dikumpulkan dibagi dengan jumlah yang ditargetkan yaitu 1 data dan informasi. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target meskipun IKU ini adalah IKU baru. IKU ini sangat berkaitan erat dengan IKU “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)” karena kegiatan pengawasan pulbaket termasuk ke dalam rencana pengawasan tahun 2023. Berikut rekapitulasi IKU 9 periode tahun 2020-2023:

*Tabel 22.Rekapitulasi IKU "Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)"
Periode 2020-2024*

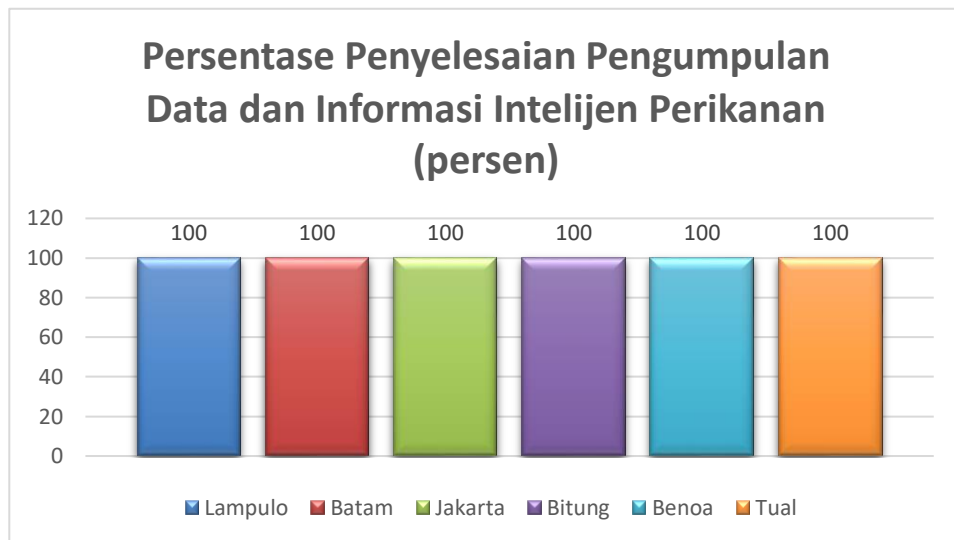
SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Kegiatan ini termasuk IKU baru, sehingga persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022. IKU ini belum masuk kedalam renstra 2020-2024 sehingga masih perlu adanya telaah/reviu renstra di tahun 2024. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. IKU ini memiliki output kendali tinggi karena perlu adanya laporan pengamatan/penelitian/hasil pulbaket/laporan masyarakat.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp 1.500.000.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.499.942.720,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien karena kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan adanya penggabungan kegiatan pengawasan UPI dengan pengawasan distribusi pada periode ini.

Capaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan” pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian

yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan” dengan unit kerja lain :



Grafik 13. Perbandingan IKU 9 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan seluruh UPT Pangkalan dimana seluruh UPT memiliki capaian IKU ini sebesar 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya koordinasi yang baik dengan Loka PSPL Seranga sehingga kegiatan pengawasan menjadi optimal.

3.3.8 Sasaran Kegiatan 8, Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 10 “Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)”

Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenalan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada :

- UPT PSDKP untuk pengenalan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- UPT PSDKP untuk pengenalan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Perhitungan jumlah pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenalan sanksi administratif dibagi jumlah seluruh kasus pelanggaran administratif. Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengenalan sanksi administratif atas pelanggaran SPKP sebanyak 226 kasus pelanggaran. Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan melalui sistem pemantauan kapal perikanan. Kasus pelanggaran yang dilakukan kapal perikanan seluruhnya sudah di terbitkan Surat peringatan 1 (Satu). Target pada IKU ini adalah 1 (satu) sehingga didapatkan capaian indeks sanksi administrasi sebesar 100%.

Tabel 23. Indeks sanksi administratif periode 2020-2023

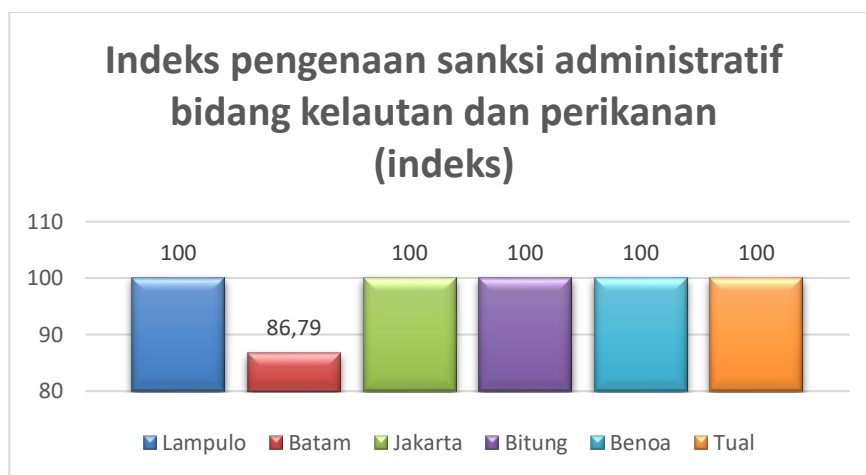
SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
indeks sanksi administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan memiliki satuan target dan perhitungan yang berbeda. Pada tahun 2022, IKU ini memiliki satuan persentase dan pada tahun ini memiliki satuan indeks. Secara output kasus pelanggaran tahun ini lebih banyak, dengan total kasus di tahun 2022 sebanyak 32 kasus. Meningkatnya kasus pelanggaran melalui sistem pemantauan kapal perikanan dikarenakan adanya pengendalian pengawasan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 telah dibentuk tim kerja penanganan pelanggaran di setiap UPT, termasuk Pangkalan PSDKP Jakarta. Tim kerja ini meningkatkan produktivitas kegiatan di bidang penanganan pelanggaran.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan “Indeks Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks) belum ada, sehingga diperlukan adanya reviu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU ini belum ada karena kegiatan baru dimunculkan pada tahun 2023 dan termasuk IKU baru. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2024 untuk menunjukkan perlu adanya penambahan IKU pada Renstra 2020-2024 agar relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 99.998.403,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Persentase Efektivitas penerapan sanksi administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase Efektivitas penerapan sanksi administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 14. Perbandingan IKU 10 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih tinggi dari 4 (empat) UPT lainnya. Capaian IKU ini lebih tinggi dari pada Pangkalan PSDKP Batam. Hal ini dikarenakan setiap UPT telah menindaklanjuti seluruh kasus terkait sanksi administratif selama tahun 2023.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Bimtek Pengelolaan PNPB di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 19 - 21 april 2023 di Hotel Ciputra Cibubur JL. Alternatif Cibubur KM.4, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

IKU 11 “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perhitungan kegiatan ini. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan rekapitulasi kapal perikanan yang terindikasi pelanggaran berdasarkan surat dari Direktorat Pemantauan dan

Operasi Armada. Total kapal perikanan yang melanggar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 421 kapal yang kemudian dilakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sampai dengan tahun 2023, pengawas perikanan telah melakukan klarifikasi sebanyak 312 kapal perikanan. Dari data tersebut didapatkan realisasi sebesar 74,1%. IKU ini belum memenuhi target yang telah ditentukan. Target 2023 adalah 80%, tidak tercapainya IKU ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Pemilik kapal yang telah diberikan surat pemanggilan tidak hadir sehingga perlu waktu lebih untuk dilakukan pemanggilan ke-2 dan seterusnya;
2. Jumlah kasus yang selalu bergerak dinamis sehingga jumlahnya melebihi kapasitas pengawas perikanan dalam permintaan keterangan kepada pemilik/pemberi keterangan.

Tabel 24. Rekapitulasi Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Periode 2020-2023

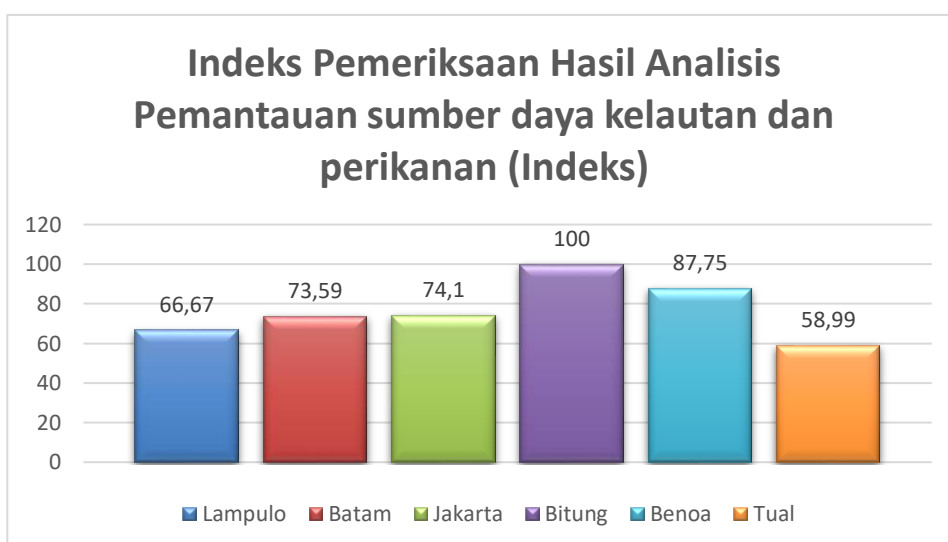
SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

IKU "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)" merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Satuan pengukuran pada IKU ini adalah indeks dengan sumber data Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jenis perhitungan data yang digunakan IKU ini adalah nilai posisi akhir.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks) belum ada, sehingga diperlukan adanya reviu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU ini belum ada karena kegiatan baru dimunculkan pada tahun 2023 dan termasuk IKU baru. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2024 untuk menunjukkan perlu adanya penambahan IKU pada Renstra 2020-2024 agar relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 99.998.403,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)” pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 15. Perbandingan IKU 11 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan 3 (tiga) UPT lainnya. Adapun 1 (satu) UPT tidak memiliki capaian karena Pangkalan PSDKP Batam tidak diberikan anggaran untuk melaksanakan Koordinasi Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Cirebon pada tanggal 13-14 September 2023.

IKU 12 “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)”

Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja MONEV pengenaan sanksi administratif oleh UPT PSDKP. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan monev sanksi administratif atas indikasi pelanggaran yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 28-29 Desember 2023 dengan SPT No. B.4813/PSDKPLAN.3/KP.440/XII/2023. Pengukuran kegiatan ini berdasarkan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

Tabel 25. Perhitungan IKU "Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administrasi"

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persiapan	20	Laporan Pengenaan Pelanggaran Sanksi Administratif	
2	Analisis pemilihan lokasi MONEV	20	Dokumen Rencana Pelaksanaan MONEV	ST/Memo/Rencana Kegiatan Disposisi /Dokumen Lainnya
3	Pelaksanaan koordinasi, Supervisi/MONEV	55	Dokumentasi pelaksanaan	
4	Penyusunan laporan Supervisi/MONEV	5	Laporan pelaksanaan MONEV	
JUMLAH		100		

Kegiatan monev sanksi administratif yang dilakukan telah memenuhi seluruh tahap penyelesaian sesuai tabel diatas. Terdapat laporan pengenaan sanksi administratif pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu Cirebon. Evaluasi tersebut menghasil data pelanggaran di kejawatan sebanyak 25 kapal yang terdeteksi mematikan VMS. Kegiatan evaluasi telah dilengkapi dokumentasikan di dalam laporan pelaksanaan sehingga dapat disimpulkan IKU ini tercapai sebesar 100% sesuai dengan target yang ditentukan pada tabel penilaian diatas. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai IKU dengan didukung adanya tim kerja penanganan pelanggaran. Dibentuknya tim kerja ini membantu penyelesaian seluruh kegiatan yang terkait pelanggaran yang ada baik dari pelaku usaha perikanan dan kelautan serta pelanggaran kapal perikanan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan

Tabel 26. Rekapitulasi Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administrasi

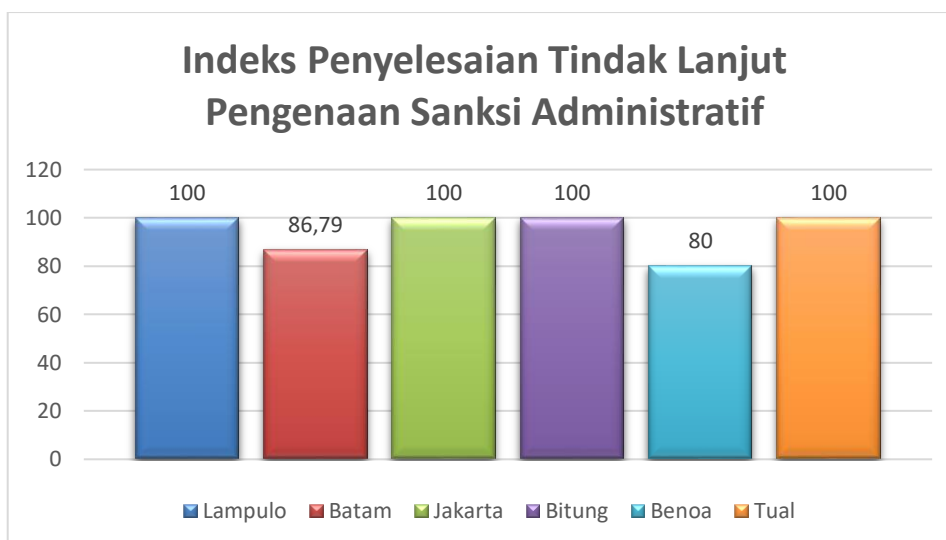
SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

IKU " Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)" merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Satuan pengukuran pada IKU ini adalah indeks dengan sumber data Laporan moneyv pengenaan sanksi administratif. Jenis perhitungan data yang digunakan IKU ini adalah nilai posisi akhir.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks) belum ada, sehingga diperlukan adanya reviu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU ini belum ada karena kegiatan baru dimunculkan pada tahun 2023 dan termasuk IKU baru. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2024 untuk menunjukkan perlu adanya penambahan IKU pad Renstra 2020-2024 agar relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 99.998.403,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU "Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif" pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU "Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (indeks)" dengan unit kerja lain :



Grafik 16. Perbandingan IKU 12 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan 3 (tiga) UPT lainnya. Adapun 2 (dua) UPT lainnya memiliki capaian lebih rendah dari Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu Pangkalan PSDKP Batam dan Benoa.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Pelatihan Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di The Trans Resort Bali, jalan Sunset Road, Seminyak, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali pada tanggal 6-10 Februari 2023.

3.3.9 Sasaran Kegiatan 9, Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Dalam rangka pencapaian SK “Tata Kelola Pemerintah yang Baik lingkup Ditjen PSDKP”, berikut beberapa IKU yang menunjang SK 7 :

IKU 13 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)”

Indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari nilai SKM yang dilaksanakan setiap triwulan sekali. Nilai SKM pada triwulan IV tahun 2023 merupakan nilai IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)” yaitu sebesar 89,9 dengan capaian sebesar 112%. Berikut nilai IKM pengguna layanan SLO periode tahun 2020-2023 :

Tabel 27. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO Periode 2020-2023

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80	88,15	110	80	90,24	113	80	89,9	112	80	87,19	109	80

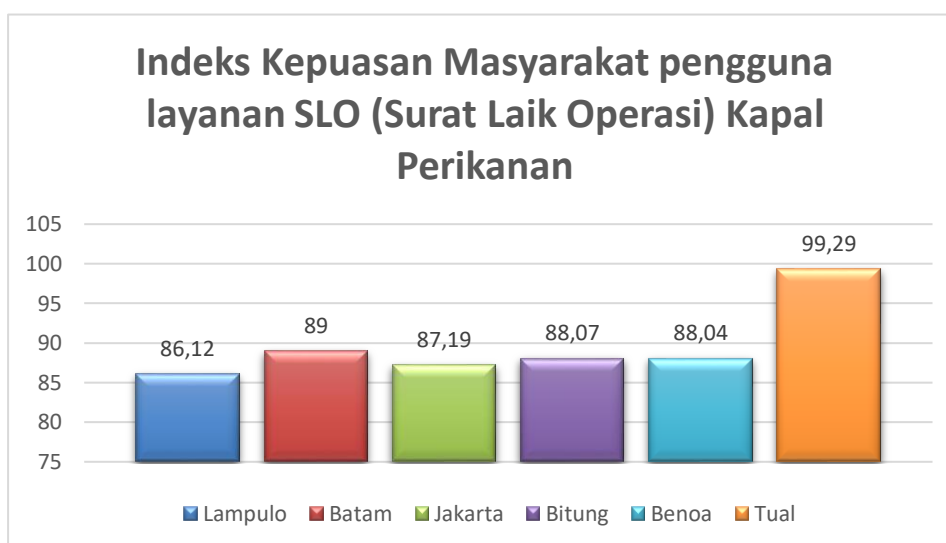
Pada tahun 2022, IKU ini terealisasi sebesar 89,9 dengan capaian sebesar 112% sedangkan pada tahun 2023, kegiatan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO terealisasi sebesar 87,19 dengan capaian 109%. Jika dibandingkan dengan tahun ini maka terdapat penurunan nilai IKM pengguna layanan SLO lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Penurunan terjadi sebesar 2,71 pada tahun 2023, akan tetapi penurunan nilai tersebut tidak merubah nilai mutu pelayanan pada perhitungan nilai survey. Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan nilai mutu pelayanan “B” dengan kinerja unit pelayanan “Baik” sesuai dengan laporan SKM Pelayanan SLO tahun 2023.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 80 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target tahun 2020-2023 maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2020-2023 sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 74.905.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 74.718.920,- (99,75%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 109% dan realisasi anggaran sebesar 99,75% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat

Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 17. Perbandingan IKU 13 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Bitung, Tual dan Lampulo. Hal ini dikarenakan bervariasinya jawaban dari responden disetiap UPT. Akan tetapi, nilai interval 88,31-100 termasuk kedalam kategori mutu pelayanan “A” dengan kinerja unit pelayanan “**Sangat baik**”

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Sosialisasi dan Bimtek Survey Kepuasan Masyarakat TW III yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 September 2023 di Cirebon.

IKU 14 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)”

Tabel 28. Rata-rata realisasi IKM LVHPI Tahun 2023

TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
92,76	89,41	88,19	88,61	89,74

Indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari nilai SKM yang dilaksanakan setiap triwulan sekali. Nilai SKM pada triwulan IV tahun 2022 merupakan nilai IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan

Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)” yaitu sebesar 88,61 dengan capaian sebesar 110,8%. Berikut nilai IKM pengguna layanan SLO periode tahun 2021-2023 :

Tabel 29. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	-	-	-	80	91,55	114	80	90,95	114	80	88,61	110,8	80

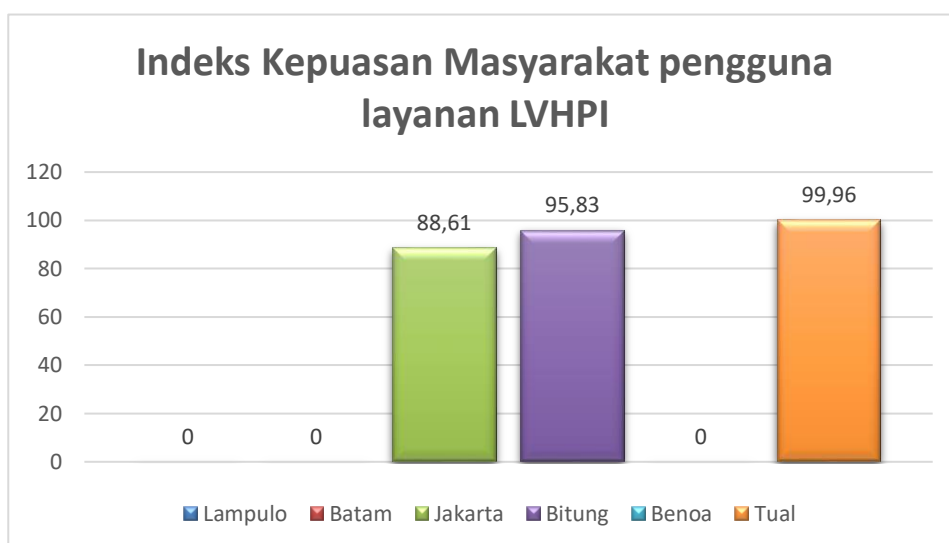
Pada tahun 2022, kegiatan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO terealisasi sebesar 90,95 dengan capaian 114%. Jika dibandingkan dengan tahun ini maka terdapat penurunan sebesar 2,34 pada tahun 2023, akan tetapi penurunan nilai tersebut tidak merubah nilai mutu pelayanan pada perhitungan nilai survey. Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan nilai mutu pelayanan “A” dengan kinerja unit pelayanan “**Sangat Baik**” sesuai dengan laporan SKM Pelayanan LVHPI tahun 2023.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 80 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target tahun 2021-2023 maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2021-2022 sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 74.905.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 74.718.920,- (99,75%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 109% dan realisasi anggaran sebesar 99,75% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)”

dengan unit kerja lain :



Grafik 18. Perbandingan IKU 14 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki nilai terendah dibandingkan dengan 2 (dua) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Bitung dan Tual. Adapun 3 (tiga) UPT yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam dan Bena tidak memiliki nilai dikarenakan tidak ada kegiatan penerbitan LVHPI. Meskipun Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki nilai terendah namun nilai tersebut masih termasuk ke dalam kategori mutu pelayanan “A” dengan kinerja unit pelayanan “**Sangat baik**”.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Sosialisasi dan Bimtek Survey Kepuasan Masyarakat TW III yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 September 2023 di Cirebon.

IKU 15 “Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)

Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak pencaangan pertama pada Oktober 2017. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komponen penilaian dalam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melengkapi seluruh komponen

penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang hasil penilaian tersebut merupakan realisasi pada IKU “Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)”. Hasil penilaian dituangkan pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI). Nilai pada LKE Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 85,95 dengan capaian sebesar 114,6%. Nilai tersebut sudah memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 75 sehingga Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari tahun sebelumnya. Berikut rekapitulasi nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta periode 2021-2022 :

Tabel 30. Rekapitulasi nilai WBK periode tahun 2021-2023

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”	75	84,99	113	75	79,91	111	75	85,86	114	75	85,95	114,6	75

Data diatas merupakan nilai WBK periode tahun 2020-2023, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan nilai tersebut dikarenakan adanya perbaikan pada setiap komponen penilaian pada tahun ini. Berikut perbandingan nilai kompenen periode tahun 2022-2023:

Tabel 31. Perbandingan nilai komponen WBK periode tahun 2022-2023

NO	KOMPONEN	REALISASI	
		2022	2023
A	I. PENGUNGKIT		
	Manajemen Perubahan	81,14	82,55
	Penataan Tata Laksana	69,48	73,81
	Penataan Sistem Manajemen SDM	78,88	86,33
	Penguatan Akuntabilitas	96,88	79,92
	Penguatan Pengawasan	80,05	67,03
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	83,40	87,27
	II. REFORM		
	Manajemen Perubahan	91,75	85,50
	Penataan Tata Laksana	66,71	66,71
	Penataan Sistem Manajemen SDM	70,00	85,00
	Penguatan Akuntabilitas	70,00	100
	Penguatan Pengawasan	91,67	85,64
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	62,75	79,25
B	HASIL		
	Pemerintah Bersih dan Bebas KKN	100	87,72

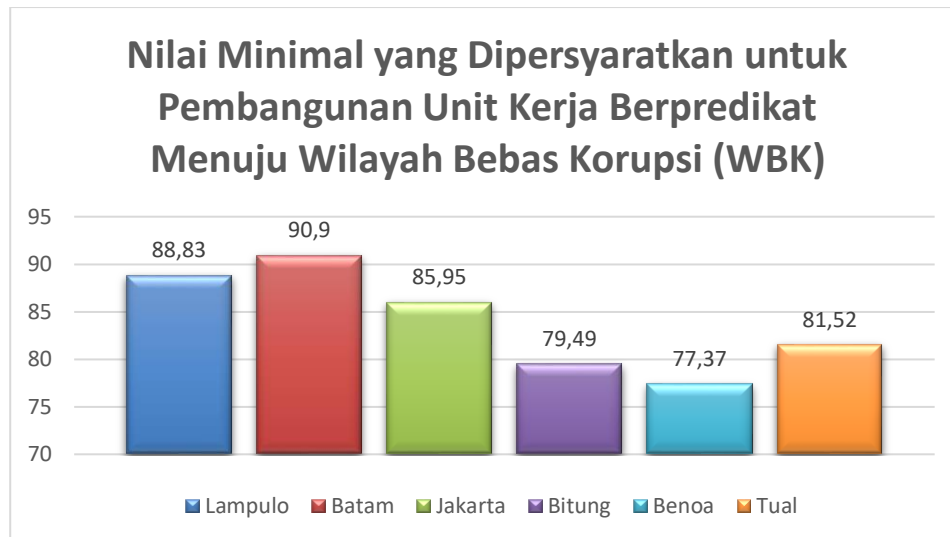
NO	KOMPONEN	REALISASI	
		2022	2023
	Kulaitas Pelayanan Publik	89,75	98,50

Pada tahun 2023, terdapat LKE baru berdasarkan keputusan Itjen nomer 22 tahun 2022 tentang juknis pengawasan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkup KKP yaitu terdapat penambahan komponen yaitu indikator reform. Jika dilihat pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa nilai komponen yang meningkat dan menurun. Pada komponen pengungkit seluruh area sudah mengalami peningkatan akan tetapi pada komponen reform dan hasil terdapat penurunan nilai. Penurunan terjadi pada indikator manajemen perubahan pada komponen reform dan kegiatan pemerintahan bersih dan bebas aktif serta kualitas pelayanan publik pada komponen hasil. Penurunan nilai pada komponen reform manajemen perubahan dikarenakan terjadi kesalahan teknis. Data dukung yang telah di upload di link penilai tidak ditemukan atau hilang. Penilaian WBK terdiri beberapa komponen dan indikator, dan point yang meningkat lebih banyak dari pada yang turun sehingga nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 75 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan predikat WBK yang telah diperoleh sejak tahun 2017.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 74.905.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 74.718.920,- (99,75%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 109% dan realisasi anggaran sebesar 99,75% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang berbeda. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 19. Perbandingan IKU 15 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan 3 (tiga) UPT Pangkalan lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Bitung, Bena, dan Tual. Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki nilai lebih rendah dibandingkan 2 (dua) UPT Pangkalan lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo dan Batam Nilai tersebut diperoleh dari kerjasama Tim Zona Integritas yang baik dan adanya keterlibatan pimpinan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Seminar Motivasi : sinergi bersama, membangun keluarga berintegritas dan antikorupsi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2023 secara daring/online. Seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. PSDKP melalui e-milea (*electronic milineal learning*).

IKU 16 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja

sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Pada triwulan IV, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengendalian manajemen risiko yang dituangkan dalam form pengendalian dan pemantauan risiko. Rencana pengendalian risiko sebanyak 24 dokumen. Dokumen tersebut telah terpenuhi sebanyak 24 dokumen setiap triwulan dan disampaikan kepada tim SPIP, sehingga didapatkan capaian IKU ini sebesar 100%. Ketercapaian IKU ini tidak lepas dari aktifnya pegawai/tim SPIP dalam mengingatkan pemilik risiko untuk melaksanakan kegiatan pengendalian berdasarkan rencana pengendalian. Tim SPIP Pangkalan PSDKP Jakarta juga telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait IKU ini yaitu *Workshop* SPIP.

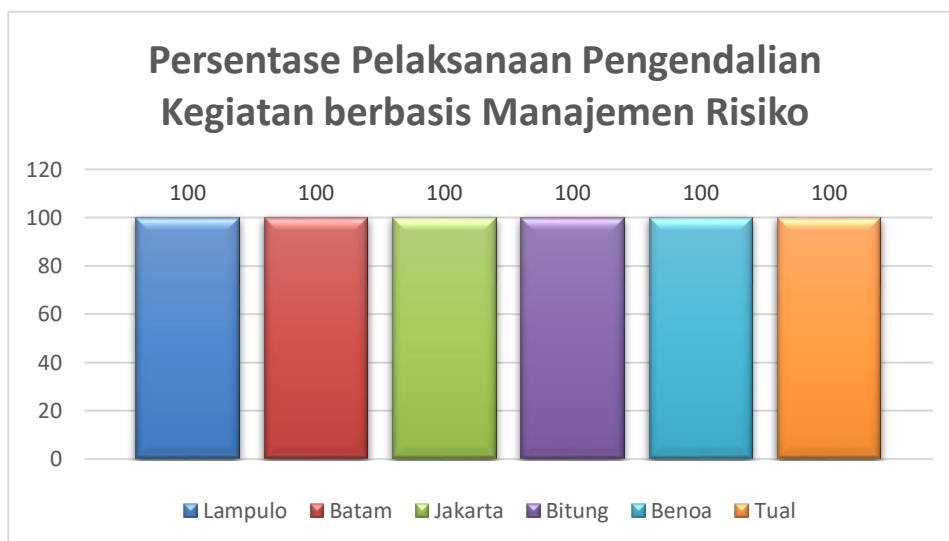
Tabel 32. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) Periode 2020-2023

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	85,95	114,6	-

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IKU ini dilakukan setiap triwulan di tahun 2023 dengan output kendali tinggi. Sumber data yang digunakan adalah form pengendalian dan pemantauan risiko.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 22.980.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.243.000,- (97%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 114% dan realisasi anggaran sebesar 97% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 20. Perbandingan IKU 16 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki nilai tertinggi dibandingkan seluruh UPT Pangkalan lainnya. Nilai tersebut diperoleh dari kerjasama Tim Zona Integritas yang baik dan adanya keterlibatan pimpinan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

IKU 17 “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Pengukuran kegiatan ini dilakukan setiap semester dan berdasarkan IK yang digunakan Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) kinerja; dan (4)

Disiplin. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2023. beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini antara lain:

- a. Melakukan update data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll.
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui *finger print online*.
- c. Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP
- d. Pembinaan pegawai pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Tabel 33. Perbandingan IKU 16 dengan unit kerja lain

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta	72	73,32	102	73	79,69	114	77	80,31	104	78	83,17	106,6	72

Berdasarkan data diatas menunjukkan nilai pada tahun 2023 secara realisasi meningkat dan mengalami penurunan secara capaian, hal tersebut terjadi karena target pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan target setiap tahun dari tahun 2023 merupakan sebuah tindakan yang positif untuk meningkatkan kompetensi ASN sehingga target pada tahun ini meningkat dari 77 menjadi 78. Realisasi IKU pada tahun 2023 sebesar 83,17 dengan capaian sebesar 106,6%.

Pada tahun 2022, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 80,31 dengan capaian 114%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKU ini mengalami peningkatan sehingga Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerja dalam meningkatkan indeks profesional ASN. Meningkatnya nilai IP ASN tidak lepas dari kinerja tim kepegawaian Pangkalan PSDKP Jakarta yang selalu mengingatkan setiap pegawai untuk mengikuti kegiatan bimtek/diklat/seminar/kursus yang di share pada group *WhatsApp*.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 72 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target IKU Indeks Profesional ASN yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 54.360.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 54.187.300,- (99,7%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 112% dan realisasi anggaran sebesar 99,7% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 21. Perbandingan IKU 17 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta

lebih rendah dibandingkan 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Batam, Benoa, dan Tual. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat pegawai di lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang memiliki kompetensi rendah dan perlu dilakukan evaluasi terhadap pegawai tersebut.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta lebih tinggi dari 2 (dua) UPT lain yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo dan Bitung. Hal ini dikarenakan adanya peran aktif tim kepegawaian dalam memberikan informasi bimtek dan diklat di media sosial Pangkalan PSDKP Jakarta.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip dan Persuratan Tingkat Dasar Akt I dan II secara online tanggal 26 - 29 September 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 26 - 29 September 2022 daring melalui Zoom meeting.

IKU 18 “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB.

Tabel 34. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” periode 2020-2023

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,50	79,25	98,45	-

Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) telah dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari dan Inspektorat Jenderal II sebagai tim penilai. Hasil penilaian mandiri kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 79,25 dengan capaian 98,45%. IKU ini tidak mencapai target karena ada beberapa komponen

pengukuran yaitu pengukuran kinerja yang tidak tercapai. Pengukuran didasarkan dari nilai NKO setiap tahun dari aplikasi kinerjaku. Pada tahun 2021, NKO Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 109,98 sedangkan pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan. Penurunan nilai NKO Pangkalan PSDKP Jakarta setiap tahun karena beberapa hal :

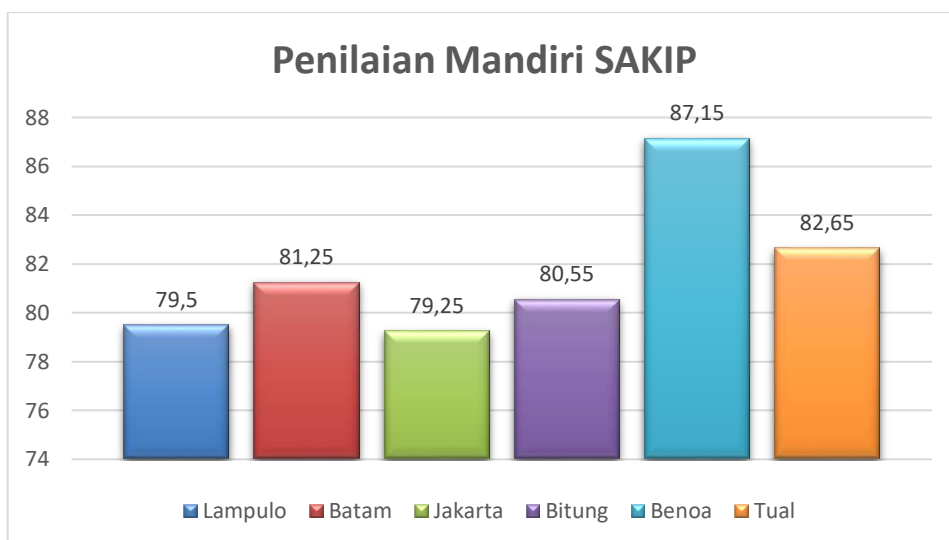
1. Jumlah IKU yang diampuh setiap tahun berbeda;
2. Terdapat perubahan manual iku/perhitungan pada IKU yang diampuh;
3. Terdapat perubahan jumlah target/satuan target pada IKU yang diampuh.

Hal tersebut mempengaruhi tim penilai untuk memberikan nilai tertinggi, karena tidak sesuai dengan juknis penilaian tim Inspektorat Jenderal II, KKP.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, IKU “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” adalah “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta”. Dikarenakan perbedaan manual iku dan nilai target maka IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta belum ada. Sehingga perlu adanya telaah/reviu renstra di tahun 2024.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 6.732.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.730.000,- (99,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 108% dan realisasi anggaran sebesar 99,9% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)” dengan unit kerja lain :



Grafik 22. Perbandingan IKU 18 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dibandingkan 5 (lima) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Batam, Benoa, Bitung, Tual dan Lampulo. Hal ini dikarenakan nilai NPSS Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dari keempat UPT tersebut sehingga total nilai pada aspek ketercapaian menurun dan mempengaruhi Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya diklat sebagai berikut :

Tabel 35. Rekapitulasi Kegiatan Bimtek dan Diklat terkait Nilai Rekonsiliasi Kinerja

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja	18-20 Januari 2023	Hotel Mercure Bandung City Center, Jl. Lengkong Besar no. 8, Cikawao, Bandung
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022	18-20 Januari 2023	Hotel Mercure Bandung City Center, Jl. Lengkong Besar no. 8, Cikawao, Bandung

IKU 19 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)”

Capaian kinerja IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” diperoleh dari jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pangkalan PSDKP Jakarta berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2021 s.d 30 September 2022 yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Selama periode LHP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta memperoleh 4 (empat) jumlah rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Seluruh rekomendasi tersebut telah diselesaikan dan ditindaklanjuti sehingga realisasi IKU ini sebesar 100%. Target yang ditentukan pada tahun 2022 sebesar 70%, sehingga capaian yang diperoleh Pangkalan PSDKP Jakarta lebih dari 120%. Capaian kegiatan yang tinggi ini menunjukkan Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai IKU baru pada tahun 2022. Keberhasilan ini didukung karena adanya koordinasi yang baik antara pihak Pangkalan PSDKP Jakarta, Seditjen PSDKP dan APIP Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal, KKP Nomor 106/ITJ0./TU.140/I/2024 tanggal 11 Januari 2023, Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki 12 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Sampai dengan Desember 2023, semua rekomendasi telah ditindaklanjuti. Sehingga Capaian IKU ini didapatkan sebesar 100%.

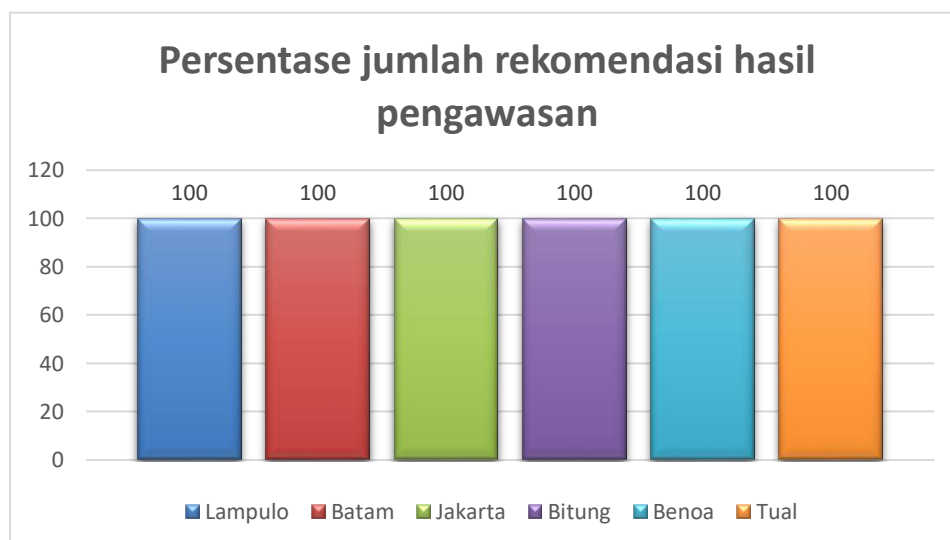
Tabel 36. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan periode 2020-2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,50	79,25	98,45	-

IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022. Pada rencana strategis 2020-2024, target untuk IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan(%)” belum ada, sehingga perlu adanya reviu renstra untuk menyesuaikan dengan perjanjian kinerja yang telah revisi.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 17.210.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.202.500,- (99,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 120% dan realisasi anggaran sebesar 99,9% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” dengan unit kerja lainnya :



Grafik 23. Perbandingan IKU 19 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian sama dengan seluruh UPT lainnya. Hal ini dikarenakan setiap UPT telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal.

IKU 20 “Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)”

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Pangkalan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pada tahun 2023, Pangkalan PSKDP Jakarta telah melaksanakan kegiatan implementasi budaya kerja dengan melengkapi data dukung sesuai dengan LKE budaya kerja. Penilaian dilaksanakan pada bulan Desember 2023. Paangkalan PSKDP Jakarta mendapatkan nilai 23,83 dengan capaian sebesar 113%. Terpenuhinya target pada IKU ini membuktikan bahwa Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja dengan baik. Kegiatan ini tidak lepas dari dukungan pimpinan dalam memberikan arahan pada setiap apel pagi untuk meningkatkan integritas diri dalam menjalankan suatu pekerjaan serta tim GKM yang selalu mengingatkan untuk tetap menjaga budaya kerja yang baik. Berikut nilai implementasi budaya kerja periode 2022-2023:

Tabel 37. Nilai Unit Kerja yang Menerapkan Implementasi Budaya Kerja periode 2020-2023

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	%	T	R	%	T
Nilai implementasi budaya kerja (nilai)	-	-	-	-	-	-	21	23,01	110	21	23,83	113	-

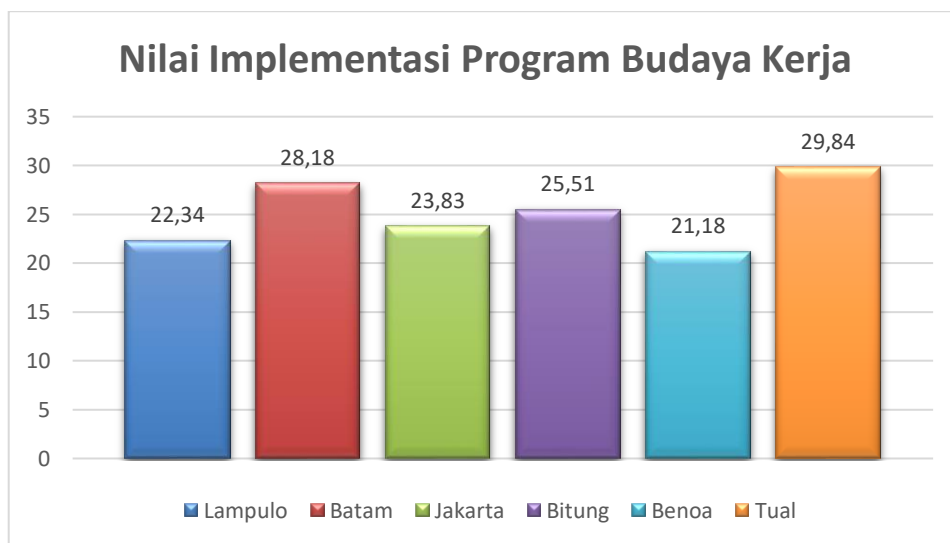
Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Jakarta memperoleh nilai budaya kerja sebesar 23,01 dan meningkat pada tahun ini. Peningkatan tahun ini merupakan keberhasilan yang didukung seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta dalam menjalankan budaya kerja yang baik. Tim GKM Pangkalan PSDKP Jakarta juga terlibat dalam penilaian program budaya kerja ini dalam mengoptimalkan kegiatan yang ada untuk dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Pada rencana strategis 2020-2024, target untuk IKU “Nilai implementasi budaya kerja (nilai)” belum ada, sehingga perlu adanya reviu renstra untuk menyesuaikan dengan perjanjian kinerja yang telah revisi.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (100%). Berdasarkan analisis

capaian kinerja IKU yakni 110% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai implementasi program budaya kerja” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai implementasi program budaya kerja” dengan unit kerja lain :



Grafik 24. Perbandingan IKU 20 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian lebih rendah dari 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Tual, Bitung dan Batam. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kepedulian pegawai terhadap lingkungannya. Kepedulian pegawai terhadap lingkungan tersebut termasuk dalam komponen *Go Green* yang terdapat pada LKE Budaya kerja sehingga mempengaruhi rendahnya nilai LKE budaya kerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan Pendampingan Implementasi 5R dan *Go Green* di Pangkalan Jakarta sebanyak 2 kali oleh Tim Budaya Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP KKP. Kegiatan tersebut termasuk dalam salah satu komponen 11 program Budaya Kerja Lingkup Dirjen PSDKP. Berikut rekapitulasi pendampingan yang mendukung iku ini :

Tabel 38. Rekapitulasi Kegiatan Bimtek dan Diklat terkait Implementasi Budaya Kerja

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Pendampingan Implementasi 5R dan Go Green di Pangkalan Jakarta	4 Agustus 2023	Pangkalan PSDKP Jakarta
2	Pendampingan Implementasi 5R dan Go Green di Pangkalan Jakarta	31 Agustus 2023	Pangkalan PSDKP Jakarta

IKU 21 “Inovasi yang dihasilkan (inovasi)”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan.

Pada tahun 2023, Pangkalan PSKDP Jakarta telah menghasilkan 2 inovasi. Inovasi yang telah diterapkan untuk mendukung pelayanan publik adalah SIPINTER dan SIPP. Inovasi ini juga telah diikutsertakan dalam lomba inovasi Ditjen PSDKP Tahun 2023 pada bulan Desember 2023. Realisasi kegiatan ini sebesar 2 (dua) inovasi dengan capaian sebesar 120%. Berikut nilai IKU Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik periode 2021-2022:

Tabel 39. Inovasi yang dihasilkan (inovasi) periode 2021-2022

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)”	-	-	-	1	1	100	1	1	100	1	2	100	-

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Jakarta telah menghasilkan 1 (satu) inovasi berupa MAS BRO (*Massage Broadcast*). Inovasi yang dihasilkan pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) inovasi yaitu SIPINTER (Sistem Pelayanan Informasi Terpadu) dan SIPP (Sistem), sehingga secara realisasi dan capaian IKU ini berhasil meningkat dari tahun sebelumnya. Pangkalan PSDKP Jakarta

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, IKU “Inovasi yang dihasilkan (inovasi)”” belum ada, sehingga diperlukan adanya reviu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU ini belum ada karena kegiatan baru dimunculkan pada tahun 2021. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan perlu adanya penambahan IKU pad Renstra 2020-2024 agar relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 850.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 850.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik” pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik” dengan unit kerja lain :



Grafik 25. Perbandingan IKU 21 dengan UPT lainnya

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian seluruh UPT Pangkalan memiliki capaian yang sama. Setiap UPT mengupayakan agar memiliki inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja masing-masing.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya rapat internal tim inovasi yang dilaksanakan secara berkala. Rapat rutin ini

dilaksanakan agar seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam penyusunan inovasi yang diterapkan pada pelayanan publik Pangkalan PSDKP Jakarta.

IKU 22 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Pangkalan PSDKP Jakarta menggunakan sistem manajemen yang sama yang digunakan di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Bitriks. Perhitungan capaian ini didasarkan atas 3 komponen yaitu: ⁽¹⁾Dokumen; ⁽²⁾Keikutsertaan ⁽³⁾Keaktifan. Realisasi IKU “Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” triwulan IV tahun 2023 sebesar 96,48%. Target yang ditentukan pada tahun ini adalah 92%, sehingga didapatkan capaian IKU ini sebesar 105%. Berikut nilai unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar periode 2020-2023:

Tabel 40. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) periode 2020-2023

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T
Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	82	86,67	106	84	100	119	86	96,6	112	92	96,48	105	84

Pada tahun 2022, IKU ini terelisasi sebesar 96,6 dengan capaian sebesar 112% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 96,48 % dengan capaian 105%. Capaian IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu, dikarenakan pada triwulan IV terjadi perubahan media perhitungan. Pada triwulan I-III tahun 2023, perhitungan menggunakan aplikasi Bitrix sedangkan pada triwulan IV perhitungan menggunakan media Coofis atau portal.kkp.go.id, sehingga IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 84 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target dengan capaian lebih besar dari 100%, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target IKU Persentase unit kerja

yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 8.500.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.500.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 116% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan sangat efisien.

Capaian IKU “Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lainnya :



Grafik 26. Perbandingan IKU 22 dengan Unit Kerja Lainnya

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian lebih rendah dengan 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSKDP Lampulo, Batam, dan Tual. Hal ini dikarenakan setiap UPT memiliki kesadaran akan pentingnya pengisian aplikasi *Coofis* sehingga nilai pada capaian IKU ini mendapat nilai 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya kegiatan Workshop SAKIP yang dilaksanakan pada tanggal 26-29 Juli 2022. Pada Workshop SAKIP tersebut terdapat kegiatan paparan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi KKP dengan judul tema “Peran dan Optimalisasi pemanfaatan aplikasi bitrix KKP”.

IKU 23 “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Kegiatan “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan Desember 2023.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2023 berdasarkan jumlah nilai dari 5 komponen. Berdasarkan penilaian tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi sebagian besar komponen yang diminta berdasarkan Lembar Kerja Penilaian (LKE) dengan nilai 100. Capaian yang diperoleh dari target 77,5 adalah 120%.

Tabel 41. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN periode 2020-2023

IKU	2022			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	72,5	97,5	120	75	100	120	77,5	100	120	72,5

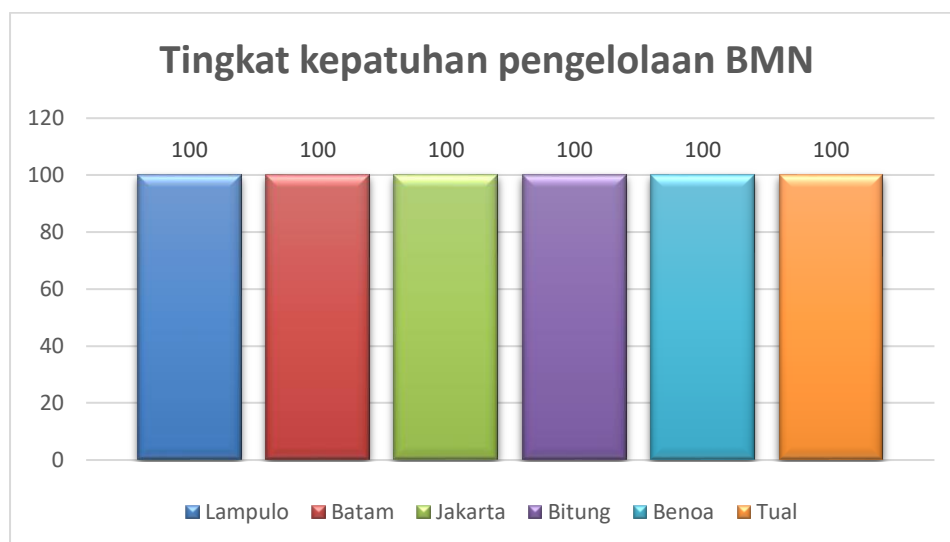
Pada tahun 2022, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100 dengan capaian 120%. Secara realisasi dan capaian, Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerjanya pada kegiatan ini meskipun terdapat perbedaan jumlah target pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, target sebesar 75 sedangkan tahun 2023 target meningkat menjadi 77,5.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 72,5 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target dengan capaian lebih besar dari 120%, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah ditentukan pada tahun

2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 9.900.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.900.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 120% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan sangat efisien.

Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 27. Perbandingan IKU 23 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian sama dengan 4 UPT lainnya yaitu Pangkalan PSKDP Batam, Bitung, Lampulo dan Tual. Hal ini dikarenakan setiap UPT memiliki tim pengelola BMN yang kompeten serta adanya keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan BMN tersebut.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya kegiatan Diklat terkait pengelolaan BMN yang dilakukan secara berkala melalui daring/zoom. Diklat tersebut diikuti oleh tim pengelolan BMN Pangkalan PSKDP Jakarta.

IKU 24 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Kegiatan “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan Desember 2023. Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta diukur berdasarkan jumlah nilai dari 6 (enam) komponen. Berdasarkan penilaian tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi sebagian besar komponen yang diminta berdasarkan Lembar Kerja Penilaian (LKE) dengan nilai 93,39. Capaian yang diperoleh dari target 77,5 adalah 120%, berikut nilai hasil penilaian pengadaan barang/jasa Pangkalan PSDKP Jakarta:

Tabel 42. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) Periode 2021-2023

IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	72,5	85,19	118	75	100	120	77,5	93,39	120	72,5

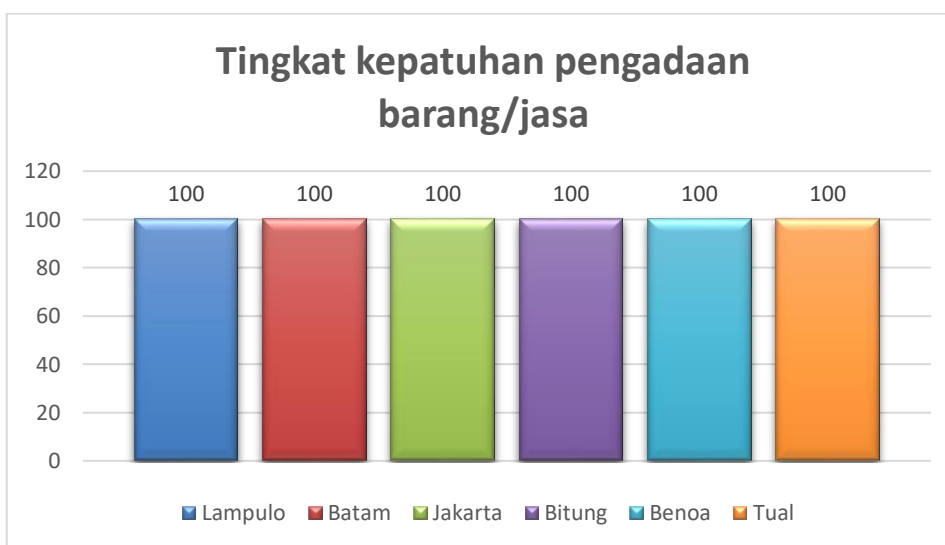
Pada tahun 2022, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 93,39 dengan capaian 120%. Jika dibandingkan dengan tahun ini, IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan terdapat pada komponen Perencanaan dan Persiapan Pengadaan dan Kesesuaian Tahap Pelaksanaan. Pangkalan PSDKP Jakarta mengalami penurunan dikarenakan pada tahun ini terdapat komponen yang belum terpenuhi yaitu :

1. Paket pengadaan belum semuanya diumumkan dalam aplikasi SIRUP;
2. Rancangan kontrak surat perjanjian untuk seluruh paket pengadaan belum tersedia pada bulan Juni;
3. Seluruh paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian belum dikontrakkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 72,5 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target dengan capaian lebih besar dari 120%, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 9.900.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.900.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 120% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan sangat efisien.

Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 28. Perbandingan IKU 24 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian sama dengan 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Batam, Bena dan Tual. Hal ini dikarenakan setiap UPT memiliki tim pengadaan barang dan jasa yang kompeten serta adanya keterlibatan pimpinan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah

adanya kegiatan Diklat terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada tanggal 13-16 Juni 2022 di Balai Diklat Aparatur Sipil Negara, Sukamandi, Jawa Barat.

IKU 25 “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

Capaian kinerja IKU “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran IK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 8 (delapan) komponen capaian yaitu Revisi DIPA, Deviasi Hal.III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Pada tahun 2023, realisasi IKU ini sebesar 90,71 dengan capaian sebesar 96,76%. Adapun rekapitulasi nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran periode tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 43. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran periode 2020-2023

IKU	2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	88	93,24	106	89	95,87	107	89	95,13	107	93,75	90,71	96,76	89

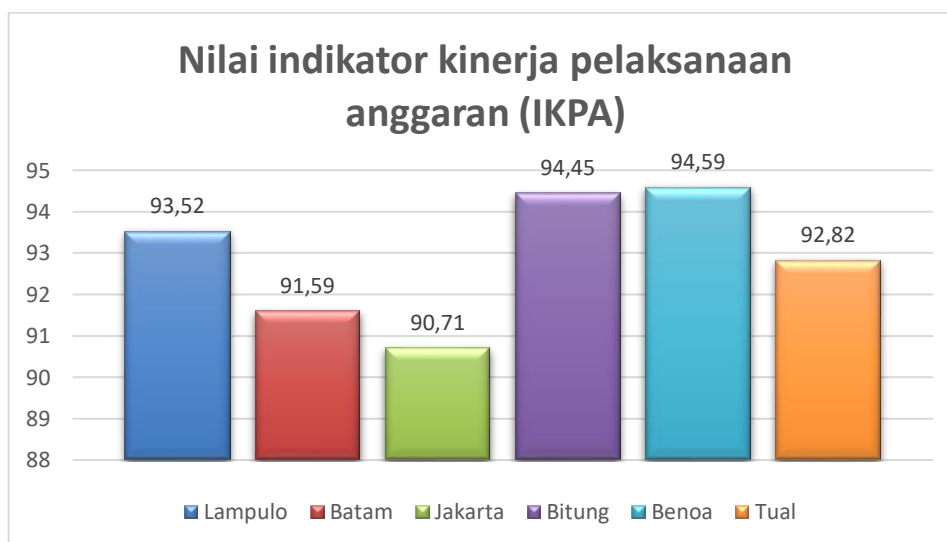
Pada tahun 2022, IKU ini terealisasi sebesar 95,13 dengan capaian sebesar 107% sedangkan pada tahun ini terealisasi sebesar 90,71. Pangkalan PSDKP Jakarta belum bisa mencapai target yang ditentukan dikarenakan kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap IKU “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)”. Diharapkan pada tahun 2024, tim keuangan dapat lebih memperhatikan kembali indikator-indikator penilaian yang terdapat pada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 89. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka Pangkalan PSDKP Jakarta berpotensi untuk mencapai target IKU “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat

mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 17.210.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.202.500,- (99,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 107% dan realisasi anggaran sebesar 99,9% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 29. Perbandingan IKU 25 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dari capaian 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSKDP Batam, Bitung, dan Lampulo. Grafik tersebut juga menunjukkan Pangkalan PSKDP Jakarta memiliki nilai capaian lebih tinggi dari 2 (dua) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Tual dan Benoa.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah rapat yang diadakan oleh KPPN Jakarta VI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan perihal strategi optimalisasi capaian IKPA Satker triwulan II tahun 2022.

IKU 26 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)"

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2023 kedalam aplikasi SMART DJA (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Pengukuran kinerja IKU ini dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82%. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2022 adalah 84,82% dengan capaian sebesar 103,4%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai nilai target yang ditentukan pada tahun berjalan. Keberhasilan pada iku ini tidak lepas dari peran aktif dari koordinator tingkat Seditjen yang secara berkala mengingatkan progress nilai kinerja anggaran di aplikasi grup *Whatsapp*.

Tabel 44. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) periode 2020-2023

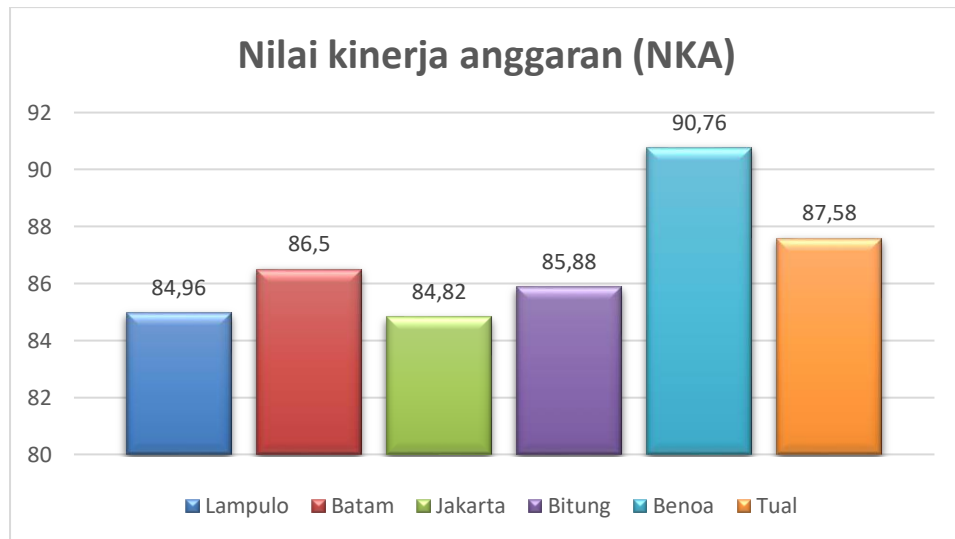
IKU	2020			2021			2022			2023			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	-	-	-	86	86,55	100	81	85,54	106	82	84,82	103,4	86

Pada tahun 2022, IKU ini terealisasi sebesar 85,54 dengan capaian sebesar 106% sedangkan pada tahun ini terealisasi sebesar 84,82 dengan capaian 103,4%. Capaian yang pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Komponen yang turun dari tahun sebelumnya adalah komponen efisiensi. Komponen ini menurun dari 1,02 menjadi 0,3 sehingga mempengaruhi nilai akhir pada realisasi IKU NKA pada tahun 2023.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 86. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka Pangkalan PSDKP Jakarta berpotensi untuk mencapai target IKU "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)" yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 17.210.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.202.500,- (99,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 106% dan realisasi anggaran sebesar 99,9% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)” dengan unit kerja lain :



Grafik 30. Perbandingan IKU 26 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian terendah daripada UPT lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat komponen efisiensi yang rendah dan kurangnya kompetensi pegawai yang melakukan penginputan pada aplikasi SMART DJA.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah rapat yang diadakan oleh KPPN Jakarta VI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan perihal strategi optimalisasi capaian IKPA Satker triwulan II tahun 2022.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp. 38.836.355.000,- dan selama periode tahun 2022 telah mengalami 13 (Tiga belas) kali revisi. Revisi anggaran dilakukan dikarenakan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran Ditjen PSDKP TA.2022 sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PSDKP. Perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 42. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Bulan Desember 2023

Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi S/D Desember 2023	%
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	Rp. 17,892,234,000	Rp. 17,884,906,875	99.96%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 150,000,000	Rp. 149,998,403	100.00%
2352	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Rp. 902,988,000	Rp. 902,980,584	100.00%
2353	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Rp. 1,500,000,000	Rp. 1,499,942,720	100.00%
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	Rp. 20,593,786,000	Rp. 20,478,953,781	99.44%
	Total	Rp. 41,039,008,000	Rp. 40,916,782,363	99.70%

BAB IV. PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKJ) periode tahun 2023 menyajikan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2023. yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam setiap tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan dalam jangka menengah. Selama tahun 2023 ini Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi sebagian besar target IKU yang ditentukan dengan jumlah 26 (Dua Puluh Enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 2 (Dua) IKU yang belum mencapai target tahunan yaitu IKU Penilaian Mandiri SAKIP dan IKU terkait IKPA.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan Desember tahun 2023 sebesar 107,81. Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Keberhasilan dalam setiap IKU tidak lepas dari kendala dan permasalahan yang terjadi dalam proses pemenuhan data dukung setiap triwulan. Berikut permasalahan dan kendala yang ada pada saat pemenuhan capaian IKU Pangkalan PSDKP Jakarta :

- IKU “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSKDP Jakarta” mengalami penurunan.

4.2 Rekomendasi

Upaya perbaikan dalam mengatasi kendala/permasalahan yang ada di Pangkalan PSDKP Jakarta adalah :

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi dasar penilaian PM SAKIP

LAMPIRAN